

PRODUK DAN LAYANAN

PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA

Produk dan Layanan

1. Penghimpunan Dana

1) Tabungan

PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Cahaya Khatulistiwa Sejahtera atau disingkat BPR Cakhra, membagi Tabungan dalam beberapa Jenis, yaitu :

a) Tabungan Cakhra Inti

Tabungan Cakhra Inti adalah Simpanan pihak ketiga pada BPR Cakhra yang diperuntukkan kepada masyarakat umum.

b) Tabungan Cakhra Bisnis

Tabungan Cakhra Bisnis adalah Simpanan pihak ketiga pada BPR Cakhra yang diperuntukkan khusus kepada para pelaku bisnis.

c) Tabungan Cakhra Junior

Tabungan Cakhra Junior adalah Simpanan pihak ketiga pada BPR Cakhra yang diperuntukkan kepada para pelajar mulai dari Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU).

d) Tabungan Cakhra Rencana

Tabungan Cakhra Rencana adalah Simpanan pihak ketiga pada BPR Cakhra dengan jangka waktu tertentu dan wajib melakukan penyetoran per bulan secara rutin dengan cara auto debit pada Tabungan Cakhra Inti, penarikan hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yang telah disepakati pada saat penandatanganan Formulir Pembukaan Tabungan.

2) Deposito

Deposito adalah Simpanan pada BPR Cakhra yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan BPR Cakhra. Deposito di BPR Cakhra terbagi dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran Dana atau biasa disebut Kredit, di BPR Cakhra dibagi dalam beberapa Jenis Kredit berdasarkan Jenis Penggunaannya, yaitu :

1) Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja dibagi dalam :

a) Pinjaman Rekening Koran

Kredit atau Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah fasilitas kredit yang disediakan BPR Cakhra untuk masyarakat dengan tujuan sebagai tambahan modal usaha, dengan sistem revolving dan jangka waktu maksimal 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pengajuan dari debitur dan disetujui oleh BPR Cakhra, kewajiban debitur hanya membayar bunga setiap bulannya berdasarkan pemakaian kredit.

b) Demand Loan

Demand Loan (DL) adalah fasilitas kredit yang disediakan BPR Cakhra untuk masyarakat dengan tujuan sebagai tambahan modal usaha (*dana cadangan/standby loan*), dengan sistem revolving dan jangka waktu maksimal 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pengajuan dari debitur dan disetujui oleh BPR Cakhra, penarikannya wajib memberi tahukan kepada pihak BPR Cakhra 1(satu) hari sebelum penarikan, kewajiban debitur hanya membayar bunga setiap bulannya berdasarkan pemakaian kredit.

c) Fixed Loan

Fixer Loan (FL) adalah fasilitas kredit yang disediakan BPR Cakhra untuk masyarakat dengan tujuan sebagai tambahan modal usaha dalam mendukung usaha debitur dengan jangka waktu maksimal 1(satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang, dengan kewajiban per bulan hanya membayar bunga.

d) Kredit Modal Kerja Angsuran

Kredit Modal Kerja Angsuran (KMK-Angsuran) adalah fasilitas kredit yang disediakan BPR Cakhra untuk masyarakat dengan tujuan sebagai tambahan modal usaha dengan sistem pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya.

2) Kredit Investasi

Kredit Investasi (KI) adalah fasilitas kredit yang disediakan BPR Cakhra untuk masyarakat dengan tujuan untuk pembelian barang modal, kendaraan komersial atau Ruko/Rukan dengan sistem pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya.

3) Kredit Konsumsi

a) Kredit Pemilikan Rumah

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang disediakan BPR Cakhra untuk masyarakat dengan tujuan untuk membiayai atas pembelian rumah tinggal dengan sistem pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya.

b) Kredit Kendaraan Bermotor

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah fasilitas kredit yang disediakan BPR Cakhra untuk masyarakat dengan tujuan untuk

membiayai atas pembelian kendaraan bermotor yang tujuannya digunakan untuk keperluan non komersial dengan sistem pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya.

c) Kredit Aneka Manfaat

Kredit Aneka Manfaat (KAM) adalah fasilitas kredit yang disediakan BPR Cakhra untuk masyarakat dengan tujuan untuk keperluan multi guna (berbagai keperluan) dengan sistem pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya.

3. Pelayanan Jasa

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah Fasilitas Layanan yang disediakan BPR Cakhra kepada masyarakat guna pembayaran berbagai kewajiban berupa pembayaran PLN, PDAM, Telepon, Internet, Pembelian Pulsa/Paket Data, Pembayaran Premi Asuransi, Pembayaran Iuran BPJS, Pembayaran Leasing dan lain-lain, dimana BPR Cakhra bekerja sama dengan PT. Indo Sakti Cakrawala.

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola.

Alamat	Jl. Gajah Mada No. 26-27, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
Nomor Telepon	0561-582226
Penjelasan Umum	Manajemen PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara Umum Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas Prinsip Tata Kelola. Dalam Hal terdapat kelemahan Penerapan Prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut Tidak Signifikan dan dapat diselesaikan dengan Tindakan Normal oleh Manajemen BPR.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Hasil Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera setelah Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko untuk Tahun 2024 memperoleh Nilai Komposit 2. Hal ini mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan dan melaksanakan Penerapan Tata Kelola secara umum sudah Baik, juga mencerminkan pemenuhan dan pelaksanaan memadai atas Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tentunya belumlah dapat dikatakan sempurna Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR di PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera, masih banyak yang perlu diperbaiki terutama bagaimana mempertahankan bahkan meningkatkan Kinerja Keuangan untuk tahun-tahun selanjutnya, kekurangan-kekurangan tersebut harus diperbaiki dari waktu ke waktu agar Hasil Penerapan Tata Kelola bukan hanya secara Nilai Baik, namun dalam pelaksanaannya dan didukung dengan Kinerja Keuangan yang Sangat Baik pula, sehingga akhirnya Visi dari PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera yaitu "Menjadi BPR Terbaik di Kalimantan Barat" dapat Terwujud.

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK	---
	Nama	Hasan
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas & Tanggung Jawab	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu menghimpun dana, menyalurkan kredit, menempatkan dana dari dan pada BPR/Bank Lain, menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya atas Persetujuan Dewan Komisaris. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Juga sebagai Ketua Komite Kredit, Pengendali dan Koordinasi Proses Bisnis, Pemantauan perkembangan likuiditas BPR, mewakili BPR dalam hubungannya dengan pihak lain, mengontrol pencapaian tingkat kesehatan BPR yang Sehat, Mengontrol upaya mengoptimalkan laba, mengontrol secara umum operasional BPR, mengendalikan keuangan dan aset BPR dan membina serta mengawasi karyawan.
2.	NIK	---
	Nama	Muhammad Purnama
	Jabatan	Direktur
	Tugas & Tanggung Jawab	Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR, membawahkan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, APU, PPT dan PPPSPM, memastikan dan meningkatkan tata tertib dan

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

		<p>disiplin kerja, membudayakan Kepatuhan dan Sadar Risiko, menatausahakan dan mengkoordinir kegiatan operasional BPR terutama yang bersifat internal, memantau perkembangan likuiditas BPR, mempersiapkan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga, mendistribusikan dan memonitor pelaksanaan operasional, mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian masalah operasional BPR untuk dibahas dan diputuskan bersama-sama Direktur Utama, menghitung dan menganalisa pencapaian tingkat kesehatan BPR guna mengoptimalkan laba, mengawasi jalannya kegiatan operasional kantor, mengendalikan keuangan dan aset BPR, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh karyawan.</p>
--	--	--

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Telah melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan setiap bulannya dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Penyelesaian AYDA telah dibuat dan dibahas setiap minggunya. Semua Nasabah telah dilakukan pengkinian datanya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Telah beberapa kali melakukan ujicoba Perhitungan CKPP dan dampak yang ditimbulkannya melalui Simulasi KPMM, ROA dan BOPO. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024 akan dilakukan evaluasi secara khusus pada bulan April 2025.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK	---
	Nama	H. Nursalam
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas & Tanggung Jawab	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan operasional BPR diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya yang terkait, mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan pihak ketiga sesuai dengan Anggaran Dasar. Mengevaluasi kinerja Direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, rencana bisnis dan

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

		peraturan yang berlaku, membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional BPR, melaporkan hasil pengawasan operasional BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, melakukan rapat evaluasi dengan Direksi, mewakili Direksi untuk sementara jika kedua anggota Direksi berhalangan atau berhenti, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Direksi tidak hadir, melaksanakan Rapat Dewan Komisaris.
2.	NIK	---
	Nama	Sunadi Harsono
	Jabatan	Komisaris
	Tugas & Tanggung Jawab	Membantu Komisaris Utama guna memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan operasional BPR diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya yang terkait, melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategi dan menyiapkan agenda Rapat Dewan Komisaris, merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris, melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional BPR yang dijalankan Direksi, mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan pihak ketiga sesuai anggaran dasar, mengevaluasi kinerja Direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, rencana bisnis dan peraturan yang berlaku, membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional BPR, melaporkan hasil pengawasan operasional BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, melakukan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, mewakili Direksi untuk sementara jika kedua anggota Direksi berhalangan atau berhenti, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Direksi tidak hadir, melaksanakan Rapat Dewan Komisaris.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Tetap memperhatikan RBB sebagai pedoman dalam menjalankan tugas agar kinerja khususnya kinerja keuangan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Penyelesaian AYDA. Semua Nasabah wajib dilakukan update dokumen dan diperhatikan nilai transaksinya agar tidak terindikasi melanggar ketentuan APU & PPT. Lakukan ujicoba Perhitungan CKPN. Kinerja Tahun 2024 harus benar-benar dijadikan pelajaran yang sangat berarti untuk Kinerja yang lebih baik di Tahun 2025. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024 perlu dilakukan evaluasi secara khusus.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	
4.	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	
5.	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	Program Kerja	
	Realisasi	
	Jumlah Rapat	

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen Ya/Tidak
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.									
2.									
3.									

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada Kelompok Usaha BPR.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya
1.	---	Hasan	Tidak Ada	0%	0%
2.	---	Muhammad Purnama	Tidak Ada	0%	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya
1.	---	H. Nursalam	Tidak Ada	0%	0%
2.	---	Sunadi Harsono	Tidak Ada	0%	0%

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya
1.	---	Alip Hanoky	Tidak Ada	45%	45%
2.	---	Charles Ferlani Lim	Tidak Ada	35%	35%
3.	---	Apriyanto	Tidak Ada	20%	20%

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1.	---	Hasan	Tidak Ada	Tidak Ada	0%
2.	---	Muhammad Purnama	Tidak Ada	Tidak Ada	0%

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1.	---	H. Nursalam	Tidak Ada	Tidak Ada	0%
2.	---	Sunadi Harsono	Tidak Ada	Tidak Ada	0%

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
			Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	---	Hasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	---	Muhammad Purnama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	---	H. Nursalam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	---	Sunadi Harsono	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	---	Alip Hanoky	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	---	Charles Ferlani Lim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	---	Apriyanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
			Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	---	Hasan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	---	Muhammad Purnama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	---	H. Nursalam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	---	Sunadi Harsono	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	---	Alip Hanoky	Tidak Ada	Tidak Ada	Apriyanto merupakan Adik Ipar
2.	---	Charles Ferlani Lim	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	---	Apriyanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Alip Hanoky merupakan Abang Ipar

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bai Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)
1.	Gaji	2	288.600.000	2	235.200.000
2.	Tunjangan	2	69.600.000		
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi Berbasis Saham				
5.	Remunerasi Lainnya				
Jumlah Remunerasi			358.200.000		235.200.000
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	1	78.000.000		
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya				
Jumlah Fasilitas Lainnya			78.000.000		
Jlh Remunerasi dan Fasilitas Lain			436.200.000		235.200.000

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,7
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,4
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,7
---	-----

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1(satu) Tahun.

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20.03.2024	2	Pembahasan Evaluasi Kinerja bulan Januari dan Februari 2024.
2.	14.06.2024	2	Pembahasan Evaluasi Kinerja bulan Maret s/d Mei 2024.
3.	25.09.2024	2	Pembahasan Evaluasi Kinerja bulan Juni s/d Agustus 2024.
4.	09.12.2024	2	Pembahasan dan Pengesahan RBB & RAKB Tahun 2025.
5.	11.12.2024	2	Pembahasan Kinerja Tahun 2024.

Penjelasan Singkat Hasil Rapat Dewan Komisaris :

Laba bulan Januari & Februari 2024 positif, namun masih belum optimal. PPAP belum dibentuk 100%, khususnya PPAP Khusus s/d Februari 2024 kurang sebesar Rp.473,8 juta. NPL cukup tinggi, s/d Februari 2024 NPL Gross sbs 15,84% & NPL Netto sbs 13,31%. PE wajib membuat Laporan Evaluasi setiap bulannya. Segera melengkapi SOP Audit IT. HRD wajib melakukan Penilaian Kinerja Marketing. Fokus menangani NPL & penjualan AYDA. Kerjasama dengan Asuransi Jiwa Central Arta Raya (CAR) perlu dilakukan evaluasi kembali. Proses kredit diatas Rp.500 juta perlu lebih meningkatkan kehati-hatian. Agunan rumah tua harus dianalisa lebih mendalam. Restrukturisasi kredit sebaiknya diberlakukan dengan sistem bunga flat murni. PE APU & PPT wajib membuat Laporan Individual Risk Assessment (IRA), Kepala Operasional wajib melakukan Perhitungan Pajak Bulanan & Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Pajak Tahun 2020. Wajib membuat SOP Kualitas Aset BPR sesuai dengan POJK No. 1 Tahun 2024. Tetap memperhatikan kekurangan PPAP Khusus dan Penurunan NPL serta Penjualan AYDA. Tetap memperhatikan RBB sebagai Pedoman dalam menjalankan tugas agar Kinerja khususnya Kinerja Keuangan dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan AYDA perlu dibuat dan diperhatikan serta ditindak-lanjuti. Semua nasabah wajib dilakukan update dokumen dan diperhatikan nilai transaksinya agar tidak terindikasi melanggar Ketentuan APU & PPT. Mengevaluasi ketercapaian RBB sampai dengan Posisi akhir November 2024. Pembahasan tentang Simulasi Perhitungan CKPN. Tetap menekankan perlunya keseriusan dari Direksi dan Jajarannya dalam menyelesaikan NPL dengan target minimal setiap bulan dapat diselesaikan NPL 1(satu) debitur. Perlu Merevisi SOP APU & PPT. Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko perlunya mengevaluasi struktur organisasi, job description, absensi dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diselaraskan dengan POJK dan SEOJK terbaru. Menetapkan dan Menyetujui RBB Tahun 2025.

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.

No.	NIK	Nama Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	---	H. Nursalam	0	5	100%
2.	---	Sunadi Harsono	5	0	100%

Penjelasan Kehadiran :

Dalam Tahun 2024 Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri oleh Direksi dan PE, hal ini untuk kemudahan dalam berkoordinasi, sedangkan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara Telekonferensi, karena Komisaris Utama tidak di Kota Pontianak.

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).

No	PENYIMPANGAN INTERNAL	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
		ANGGOTA DIREKSI		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
1	Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Penjelasan :

Dalam tahun 2024 di PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera (BPR Cakhra) tidak ada terjadi Fraud.

L. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	1	-
Total	1	-

Penjelasan Permasalahan Hukum :

Adanya tuntutan dari debitur bermasalah yang tidak menerima jika agunan yang diserahkan dan telah dipasang Hak Tanggungan untuk dilakukan lelang terbuka, debitur menganggap sebelum pelaksanaan lelang harus meminta izin dengan debitur, hal itu telah dijalankan BPR dengan menyurati debitur mulai dari Surat Informasi Tunggakan, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, Surat Peringatan Terakhir, sampai pada Surat akan dilakukan lelang terbuka. Namun debitur menganggap hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, sehingga debitur mengajukan tuntutan melalui jalur hukum dan kemudian dicabut atau dibatalkan, dan akhirnya BPR Cakhra memberi waktu untuk debitur dapat melunasi atau dilakukan restrukturisasi kredit, namun debitur mengulur-ulur waktu, sehingga BPR Cakhra melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Pontianak. Hasil akhir dari Pengadilan Negeri Pontianak yang menghukum para Tergugat seketika dan sekaligus untuk membayar kewajiban atas sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan, namun sampai akhir tahun 2024 masalah ini belum dapat diselesaikan karena debitur mengajukan banding.

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024**

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Hasan	Direktur Utama	Sunadi Harsono	Komisaris	Kredit	400	Fasilitas Kredit Karyawan
2	Muhammad Purnama	Direktur	Sunadi Harsono	Komisaris	Kredit	42	Fasilitas Kredit Karyawan
3	Yovita	Kepala Operasional	Hasan	Direktur Utama	Kredit	10	Fasilitas Kredit Karyawan
Penjelasan :							
Transaksi yang mungkin mengandung Benturan Kepentingan merupakan Fasilitas Kredit yang diberikan kepada :							
(1). Direktur Utama dengan tujuan Pembelian Rumah Tinggal.							
(2). Direktur dengan tujuan Pembelian Sepeda Motor dan Kredit Back to Back.							
(3). Kepala Operasional dengan tujuan keperluan mendadak.							

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp.)
1.						
2.						
3.						

Penjelasan :

Pemberian atau bantuan berupa dana dan bahan makanan setiap tahun selalu dilaksanakan oleh PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera, biasanya dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan, namun dana atau bahan makanan tersebut tidak berasal dari dana PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera, namun sumber dana atau bantuan bahan makanan tersebut berasal dari Pemilik, Pengurus dan seluruh Karyawan dan Karyawati BPR.

Pontianak, 24 April 2025
PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera



Hasan
Direktur Utama



Sunadi Harsono
Komisaris

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

Nama BPR : **PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera**
 Alamat : Jl. Gajahmada No. 26-27
 Kota : Pontianak
 Sandi Bank : 602707
 Periode : Semester II Tahun 2024
 Modal Inti : Rp. 8.285.465.502,-
 Total Aset : Rp.65.218.983.721,-

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera selanjutnya disebut BPR Cakhra telah memenuhi Ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 7 Tahun 2024 khususnya Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 17 tentang Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang kepemilikannya minimal 25%, Pemegang Saham BPR Cakhra terdiri dari 2(dua) orang sebagai PSP dan 1(satu) orang Pemegang Saham Biasa, hal ini tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tanggal 06 Desember 2024 dengan rincian : Alip Hanoky 45% (Rp.3,6 milyar), Charles Ferlani Lim 35% (Rp.2,8 milyar) dan Apriyanto 20% (Rp.20%).
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan dilakukan melalui RUPS sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 06 Tanggal 12.11.2012 yang diuraikan dalam ketentuan Rapat Umum Pemegang aham pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun belum menjelaskan secara detail penggunaan laba dan cara pembagian deviden.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan Misi BPR merupakan tujuan dari BPR hal ini selalu dikomunikasi oleh pemegang	

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		saham kepada Pengurus dan Seluruh Karyawan dan Karyawati BPR Cakhra.
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Direksi setiap bulan melaporkan Hasil Kinerja Keuangan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, laporan ini sebagai bahan evaluasi dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham selalu memantau perkembangan permodalan dan mendukung dalam pemupukan modal, namun hal ini belum dituangkan secara tertulis.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham tidak menjadikan BPR sebagai sumber penghasilannya.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Sebelum RUPS dilaksanakan, hal-hal yang bersifat material dan berpengaruh pada jalannya usaha BPR selalu dibicarakan terlebih dahulu sebelum RUPS dilaksanakan, namun pembicaraan tersebut tidak dibuatkan Notulennya.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Setiap Pemegang Saham mempunyai Hak yang sama dalam berpendapat.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan Kinerja khususnya Kinerja Keuangan BPR di Tahun 2024 secara umum cukup baik, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus, yaitu wajib meningkatkan baki debet pinjaman, laba bulanan yang stabil, tingkat npl yang harus diturunkan dan penyelesaian AYDA.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham selalu melakukan diskusi bersama Pengurus dalam melakukan tindakan yang bersifat material dan strategis
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-	Kebijakan dalam penggunaan laba dan pembagian dividen belum ada aturan tertulis dan terinci, sejak berdiri sampai akhir tahun

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

	undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	2024 belum pernah dilakukan pembagian dividen.
--	--	--

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur: 1) Faktor Positif: Telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. 2) Faktor Negatif: Perlu dibuatkan Ketentuan Tertulis Penggunaan dan Pembagian Dividen.	3
b.	Proses: 1) Faktor Positif: Komunikasi berjalan dengan baik antara Pemegang Saham dengan Pengurus bahkan Karyawan dan Karyawati, Pemegang Saham mendukung pentingnya peningkatan ataupun pemupukan modal bahkan bersedia melakukan penambahan modal jika diperlukan. 2) Faktor Negatif: Kebersediaan Pemegang Saham dalam melakukan penambahan modal belum dituangkan secara tertulis.	
c.	Hasil: 1) Faktor Positif Setiap Pemegang Saham memiliki Hak Suara yang sama. 2) Faktor Negatif Kinerja Keuangan BPR belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang direncanakan.	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera telah melengkapi susunan Direksi dan salah satunya yaitu Direktur bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal pada kota yang sama dengan kedudukan kantor PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa	Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank/perusahaan/lembaga/organisasi

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

	Kuangan.	kepartaian ataupun organisasi kemasyarakatan lainnya.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau semenda sampai derajat kedua, baik sesama Direksi maupun seluruh Anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Struktur organisasi BPR telah disusun dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan BPR, telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi APU, PPT & PPPSPM, Perlindungan Konsumen, Plt. Audit Internal.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi tidak menyusun atau menetapkan kebijakan remunerasi untuk Pejabat Eksekutif dan Karyawan/karyawati.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan konsultan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK dan memiliki pengetahuan dan pengalaman pada bidang perbankan.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Seluruh Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan tidak menyerahkan atau memberi kuasa kepada siapapun.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah menjalankan Penerapan Prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, namun belum dapat dikatakan

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		sempurna.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi selalu memperhatikan, mempelajari dan menindaklanjuti hasil temuan dan berupaya agar tidak terulang kembali.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi memberikan informasi tentang kinerja PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera rutin setiap bulannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Direksi dalam mengambil keputusan selalu memikirkan dampak dari keputusan tersebut.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Direksi dalam memutuskan hal yang strategis selalu membicarakan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau dengan pihak-pihak tertentu.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Pendidikan dan pengetahuan yang berkaitan untuk kemajuan karier dan BPR Cahra secara rutin dilaksanakan, selain mengikut sertakan pada penyelenggara eksternal dan melaksanakan secara internal.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi selalu memberikan penjelasan atas kebijakan dan strategi yang akan dijalankan.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau	Direksi tidak ada hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan seluruh Anggota Dewan Komisaris, sesama Anggota Direksi lain dan seluruh Pemegang Saham BPR.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		pemegang saham BPR.	
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Semua anggota Direksi memiliki hasil Ideb yang Baik.	
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi menjalankan Pedoman dan Tata Tertib, namun tidak melakukan evaluasi secara konsisten.	
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi tidak melakukan evaluasi kebijakan remunerasi.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS.	
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh karyawan dan karyawan di jelaskan tujuan atau kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi BPR.	
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional.	
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Dalam tahun 2024 Rapat Direksi secara khusus tidak ada, yang dilakukan adalah Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris dan PE.	
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Direksi selalu belajar dan mempelajari POJK, SEOJK, Ketentuan terkait lainnya, guna meningkatkan pengetahuan.	
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan POJK.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan, pemenuhan SDM dan Struktur Organisasi sudah baik, Direksi memiliki kemampuan dan pengetahuan perbankan	

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		yang baik.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi tidak menetapkan Kebijakan Remunerasi.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Direksi tidak menyerahkan tugas kepada pihak lain atau konsultan, telah menjalankan Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Evaluasi.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi tidak melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Setiap tahun Direksi bersama-sama Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif Direksi dalam tahun 2024 tidak melakukan Rapat khusus Direksi, rapat dilakukan bersama-sama Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif.	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu sebanyak 2(dua) orang dan keduanya adalah Komisaris Independen.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seorang Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal pada kota yang sama dengan kedudukan kantor PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera dan seorang lagi bertempat tinggal di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan tempat kedudukan kantor PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak rangkap jabatan sesuai dengan Peraturan OJK.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau semenda sampai derajat kedua, baik sesama Anggota Dewan Komisaris maupun dengan seluruh Anggota Direksi.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kekeluargaan baik sesama Anggota Dewan Komisaris , dengan seluruh Anggota Direksi, maupun dengan pemegang saham.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK dan memiliki pengetahuan dan pengalaman pada bidang perbankan.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Seluruh Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan tidak menyerahkan atau memberi kuasa kepada siapapun.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis dan operasional di BPR.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris memantau atau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK dan pihak terkait lainnya.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris secara rutin meminta penjelasan atas hasil kinerja secara triwulanan.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris tidak melaksanakan evaluasi atas pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris secara rutin melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara rutin menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak manapun.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menjalankan fungsi Pengawasan atas tugas Direksi.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR Cakhra belum ada kebijakan mengenai Remunerasi dan Nominasi.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas	BPR Cakhra belum ada Komite.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	
21)		Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR Cakhra belum ada kebijakan remunerasi dan nominasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
22)		Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawab Dewan Komisaris melalui RUPS.
23)		Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Setiap Rapat Dewan Komisaris selalu dibuatkan Notulen hasil rapat.
24)		Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Belum ada Kebijakan Remunerasi.
25)		Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan Dewan Komisaris menjadi satu kesatuan dalam Laporan Realisasi RBB dan dilaporkan secara semesteran kepada OJK melalui APOLO.
26)		Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dewan Komisaris selalu belajar dan mempelajari POJK, SEOJK, Ketentuan terkait lainnya, guna meningkatkan pengetahuan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan Ketentuan OJK, seluruh Dewan Komisaris adalah komisaris independen, telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib serta tidak rangkap jabatan.	
2)	Faktor Negatif: Belum ada Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.		
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif:	

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		Belum ada Kebijakan dan Komite Remunerasi dan Nominasi.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Pertanggungjawaban Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif Belum ada Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite	

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:		
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:		
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, BPR telah memiliki SOP tentang Benturan Kepentingan.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

	termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Jika terjadi Benturan Kepentingan, maka ditangani dengan tidak berdampak kerugian bagi BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Potensi adanya benturan kepentingan selalu dihindari.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Jika terjadi Benturan Kepentingan, maka ditangani agar tidak berdampak pada kerugian BPR.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR cukup baik dalam menangani adanya benturan kepentingan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki SOP tentang Benturan Kepentingan.	
2)	Faktor Negatif: SOP perlu direvisi.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Jika terjadi Benturan Kepentingan, maka ditangani dengan tidak berdampak kerugian bagi BPR.	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Potensi adanya benturan kepentingan selalu dihindari.	
2)	Faktor Negatif	

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki PE Kepatuhan.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginiknkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Bidang Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan SOP sesuai dengan POJK dan SEOJK terkini.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PE Kepatuhan memiliki kemampuan dalam menangani fungsi kepatuhan.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Usaha yang dijalankan BPR tidak melanggar ketentuan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Kepatuhan telah menjalankan tugas sebagaimana yang telah digariskan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR belum sepenuhnya dapat menurunkan tingkat pelanggaran.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	Struktur:	3
1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Bidang Kepatuhan, telah menyusun dan mengkinikan SOP sesuai dengan POJK dan SEOJK.	
2)	Faktor Negatif: Pengetahuan bidang kepatuhan tetap harus ditingkatkan.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: BPR telah menjalankan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
2)	Faktor Negatif: Perlunya meningkatkan budaya kepatuhan.	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaporkan kepada OJK setiap tahunnya.	
2)	Faktor Negatif Perlu meningkatkan kedisiplinan dan budaya kepatuhan.	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, namun yang menjalankan tugas audit internal adalah Pelaksana Tugas (Plt) Audit Intern.
2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	BPR telah memiliki SOP namun belum mencantumkan Tata Tertib Kerja Audit Internal.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Plt. Audit Intern telah melaksanakan sebagian tugas-tugas PE Audit Internal.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Plt. Audit Intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada	Plt. Audit Intern yang ditunjuk dinilai telah memiliki kemampuan untuk menjalankan

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

	satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	tugas-tugas audit intern.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Pedoman Audit Intern diharapkan dapat menjadikan kinerja seluruh jenjang di dalam organisasi dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum melakukan kaji ulang yang dilakukan pihak ekstern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dilaksanakan secara independen dan telah menyusun rencana kerja, pelaksanaan audit, laporan audit internal termasuk didalamnya laporan hasil temuan dan tindak lanjut.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR setiap tahun selalu mengikutsertakan SDM dalam berbagai pelatihan termasuk audit internal.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak mempresentasikan Rencana dan Realisasi Program Audit Tahunan.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal kepada OJK.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	4
	1) Faktor Positif: SOP Audit Internal sudah ada, Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.	
	2) Faktor Negatif: BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern, saat ini hanya petugas yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas Audit Internal., belum memiliki Pedoman dan Tata Terbit Kerja.	
b.	Proses:	

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

	1)	Faktor Positif: Telah memiliki SOP Audit Internal sebagai Pedoman Kerja, Audit Internal bersifat independen dan selalu mengikutsertakan SDM dalam berbagai pelatihan.	
	2)	Faktor Negatif: Belum melakukan kaji ulang yang dilakukan pihak eksternal.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal kepada OJK.	
	2)	Faktor Negatif BPR tidak mempresentasikan Rencana dan Realisasi Program Audit Tahunan.	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan AP dan KAP telah sesuai dengan ketentuan.
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan AP dan KAP berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Komisaris dan disetujui melalui RUPS.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Hasil Audit KAP berikuit dengan Management Letter selalu dilaporkan kepada OJK.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil Audit KAP berikuit dengan Management Letter telah menggambarkan permasalahan di BPR.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan Hasil Audit telah sesuai dengan Ketentuan OJK.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: Penugasan AP dan KAP telah sesuai dengan ketentuan.	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Penunjukan AP dan KAP berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Komisaris dan disetujui melalui RUPS. Hasil Audit KAP berikut dengan Management Letter selalu dilaporkan kepada OJK.	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Hasil Audit KAP berikut dengan Management Letter telah menggambarkan permasalahan di BPR. Cakupan Hasil Audit sesuai dengan Ketentuan OJK.	
2)	Faktor Negatif	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko, APU & PPT, namun belum menunjuk PE Anti Fraud.
	2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR belum melakukan pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko dan Penetapan Limit.
3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan	BPR belum melakukan pengkinian Pengelolaan Risiko yang melekat pada Produk dan Aktivitas Baru.	

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

	ketentuan yang berlaku.	
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PE yang ditunjuk telah menjalankan sebagian besar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	BPR telah menyusun SOP Manajemen Risiko, SOP APU & PPT dan SOP Strategi Anti Fraud, namun SOP Manajemen Risiko dan SOP APU & PPT perlu dilakukan revisi atau pengkinian yang disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Setiap SOP yang terbit selalu diverifikasi Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris menyetujui SOP yang telah benar.
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR tidak sepenuhnya melakukan hal ini.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR tidak sepenuhnya melakukan hal ini.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	BPR telah menerapkan Program APU & PPT sesuai ketentuan.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
10)		BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum sepenuhnya menjalankan dan tahun 2025 akan memulai dengan melakukan sosialisasi Strategi Anti Fraud.
11)		BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR belum sepenuhnya menjalankannya.
12)		BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum sepenuhnya menjalankannya.
13)		BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR belum memiliki Sistem Informasi yang memadai.
14)		Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Telah dilakukan sosialisasi budaya pencegahan risiko, di tahun 2025 akan diefektifkan kembali.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15)		BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR secara Semesteran membuat Laporan Profil Risiko dan dilaporkan kepada OJK.
16)		BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR dalam menerbitkan Aktivitas dan Produk Baru wajib membuat Laporan dan menguraikan risiko-risiko yang melekat dengan aktivitas dan produk baru tersebut. Jika aktivitas dan produk baru tersebut masuk dalam katagori yang wajib memperoleh persetujuan OJK, maka BPR melaporkan dan memohon persetujuan, jika tidak perlu disetujui oleh OJK, maka BPR hanya memberitahukan kepada OJK.
17)		BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR menyusun dan melaporkan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada OJK secara Semesteran dan melalui APOLO.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	3
1)	Faktor Positif: BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko, APU & PPT dan telah ada SOP Produk dan Aktivitas Baru.	
2)	Faktor Negatif: BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko, APU & PPT, namun belum menunjuk PE Anti Fraud. BPR belum melakukan pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko dan Penetapan Limit. BPR belum melakukan pengkinian Pengelolaan Risiko yang melekat pada Produk dan Aktivitas Baru.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif	
2)	Faktor Negatif	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR sudah ada SOP BMPK.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	SOP yang ada belum dilakukan evaluasi dan pengkinian.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak	Kredit yang disetujui selalu memperhatikan

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

	terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	BMPK BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan BMPK setiap bulan dilaporkan bersama-sama dengan Laporan Bulanan BPR.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif: BPR sudah ada SOP BMPK.	
2)	Faktor Negatif: SOP BMPK perlu dilakukan evaluasi dan pengkinian.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Kredit yang disetujui selalu memperhatikan BMPK BPR.	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Laporan BMPK setiap bulan dilaporkan bersama-sama dengan Laporan Bulanan BPR. Tidak ada Pelanggaran dan Pelampauan BMPK.	
2)	Faktor Negatif	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

	termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Pelaporan khusus Kinerja Keuangan dibuat secara bulanan dan setiap bulannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusannya disampaikan kepada Pemegang Saham.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki SOP Integritas Pelaporan Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Teknologi Informasi yang digunakan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Menyusun dan Mempublikasikan Laporan Publikasi secara Triwulan.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR setiap tahun menyusun Laporan Tahunan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum sepenuhnya dijalankan.
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam menyusun dan menyajikan laporan atau informasi sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan berdasarkan ketentuan OJK
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Sebagian besar Laporan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa	BPR menyajikan dan melaporkan dengan data real dan tidak ada rekayasa keuangan.

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi disampaikan secara lengkap kepada OJK sesuai dengan Ketentuan OJK.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan dan Laporan Pengaduan selalu disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Pelaporan khusus Kinerja Keuangan dibuat secara bulanan dan setiap bulannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusannya disampaikan kepada Pemegang Saham. BPR telah memiliki SOP Integritas Pelaporan Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif: Sistem Pelaporan Keuangan tersedia dengan Cukup Baik, namun Non Keuangan yang belum tersedia.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Teknologi Informasi yang digunakan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Laporan Publikasi disusun dan dipublikasikan secara Triwulanan. Setiap Tahun BPR menyusun Laporan Tahunan dan dilaporkan kepada OJK.	
	2)	Faktor Negatif: Sebagian besar Laporan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR menyajikan dan melaporkan dengan data real dan tidak ada rekayasa keuangan. Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi disampaikan secara lengkap kepada OJK sesuai dengan ketentuan. Laporan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan dan Laporan Pengaduan selalu disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
12	Rencana Bisnis		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Setiap tahun Direksi menyusun Rencana Bisnis BPR dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis terdiri dari Rencana Strategi Tahunan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis memperoleh dukungan dari Pemegang Saham.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB dibuat dengan mempertimbangkan banyak faktor, diantaranya harus dapat dilaksanakan dan terukur, mempertimbangkan Faktor Internal dan Eksternal dengan asas perbankan yang sehat dan penerapan tindak kehati-hatian.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas RBB.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB disampaikan ke OJK melalui APOLO setiap tahunnya.
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Tidak semua Indikator Keuangan dapat tercapai sesuai RBB yang telah disusun.	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif:	

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

		Direksi menyusun Rencana Bisnis BPR dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan setiap tahun dan memperoleh dukungan dari Pemegang Saham	
	2)	Faktor Negatif: Direksi tidak membuat Rencana Strategi Jangka Panjang secara rinci.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Direksi telah membuat RBB secara realistis dan terukur.	
	2)	Faktor Negatif: RBB yang telah dibuat, pencapaiannya belum optimal.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif RBB setiap tahunnya disampaikan ke OJK melalui APOLO.	
	2)	Faktor Negatif Ada beberapa Indikator Keuangan yang tidak tercapai.	

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
Posisi : 31 Desember 2024**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3.00	2.00	2.00	-	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Predikat Komposit	Peringkat 2												

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas Prinsip Tata Kelola. Dalam Hal terdapat kelemahan Penerapan Prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut Tidak Signifikan dan dapat diselesaikan dengan Tindakan Normal oleh Manajemen BPR.

FAKTOR POSITIF

Telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Komunikasi berjalan dengan baik antara Pemegang Saham dengan Pengurus bahkan Karyawan dan Karyawati, Pemegang Saham mendukung pentingnya peningkatan ataupun pemupukan modal bahkan bersedia melakukan penambahan modal jika diperlukan. Setiap Pemegang Saham memiliki Hak Suara yang sama. Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan, pemenuhan SDM dan Struktur Organisasi sudah baik, Direksi memiliki kemampuan dan pengetahuan perbankan yang baik. Direksi tidak menyerahkan tugas kepada pihak lain atau konsultan, telah menjalankan Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Evaluasi. Setiap tahun Direksi bersama-sama Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan Ketentuan OJK, seluruh Dewan Komisaris

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

adalah komisaris independen, telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib serta tidak rangkap jabatan. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan OJK. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi melalui RUPS. BPR telah memiliki SOP tentang Benturan Kepentingan. Jika terjadi Benturan Kepentingan, maka ditangani dengan tidak berdampak kerugian bagi BPR. Potensi adanya benturan kepentingan selalu dihindari. BPR telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Bidang Kepatuhan, telah menyusun dan mengkinikan SOP sesuai dengan POJK dan SEOJK. BPR telah menjalankan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaporkan kepada OJK setiap tahunnya. SOP Audit Internal sudah ada, Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Telah memiliki SOP Audit Internal sebagai Pedoman Kerja, Audit Internal bersifat independen dan selalu mengikutsertakan SDM dalam berbagai pelatihan. BPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal kepada OJK. Penugasan AP dan KAP telah sesuai dengan ketentuan. Penunjukan AP dan KAP berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Komisaris dan disetujui melalui RUPS. Hasil Audit KAP berikuit dengan Management Letter selalu dilaporkan kepada OJK. Hasil Audit KAP berikuit dengan Management Letter telah menggambarkan permasalahan di BPR. Cakupan Hasil Audit sesuai dengan Ketentuan OJK. BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko, APU & PPT dan telah ada SOP Produk dan Aktivitas Baru. BPR sudah memiliki SOP BMPK. Kredit yang disetujui selalu memperhatikan BMPK BPR. Laporan BMPK setiap bulan dilaporkan bersama-sama dengan Laporan Bulanan BPR. Tidak ada Pelanggaran dan Pelampauan BMPK. Pelaporan khusus Kinerja Keuangan dibuat secara bulanan dan setiap bulannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusannya disampaikan kepada Pemegang Saham. BPR telah memiliki SOP Integritas Pelaporan Keuangan. Teknologi Informasi yang digunakan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Laporan Publikasi disusun dan dipublikasikan secara Triwulanan. Setiap Tahun BPR menyusun Laporan Tahunan dan dilaporkan kepada OJK. BPR menyajikan dan melaporkan dengan data real dan tidak ada rekayasa keuangan. Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi disampaikan secara lengkap kepada OJK sesuai dengan ketentuan. Laporan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan dan Laporan Pengaduan selalu disampaikan kepada OJK secara tepat waktu. Direksi menyusun Rencana Bisnis BPR dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan setiap tahun dan memperoleh dukungan dari Pemegang Saham. Direksi telah membuat RBB secara realistis dan terukur. RBB setiap tahunnya disampaikan ke OJK melalui APOLO.

FAKTOR NEGATIF

Perlu dibuatkan Ketentuan Tertulis Penggunaan dan Pembagian Dividen. Kebersediaan Pemegang Saham dalam melakukan penambahan modal belum dituangkan secara tertulis. Kinerja Keuangan BPR belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Direksi tidak menetapkan Kebijakan Remunerasi. Direksi tidak melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi. Direksi dalam tahun 2024 tidak melakukan Rapat khusus Direksi, rapat dilakukan bersama-sama Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif. Belum ada Kebijakan Remunerasi dan Nominasi. Belum ada Kebijakan dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Belum ada Kebijakan Remunerasi dan Nominasi. SOP perlu direvisi. Pengetahuan bidang kepatuhan tetap harus ditingkatkan. Perlunya meningkatkan budaya kepatuhan. Perlu meningkatkan kedisiplinan dan budaya kepatuhan. BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang

**LAPORAN PENILAIAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR
SEMESTER II TAHUN 2024**

menangani Fungsi Audit Intern, saat ini hanya petugas yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas Audit Internal., belum memiliki Pedoman dan Tata Terbit Kerja. Belum melakukan kaji ulang yang dilakukan pihak eksternal. BPR tidak mempresentasikan Rencana dan Realisasi Program Audit Tahunan. BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko, APU & PPT, namun belum menunjuk PE Anti Fraud. BPR belum melakukan pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko dan Penetapan Limit. BPR belum melakukan pengkinian Pengelolaan Risiko yang melekat pada Produk dan Aktivitas Baru. SOP BMPK perlu dilakukan evaluasi dan pengkinian. Sistem Pelaporan Keuangan tersedia dengan Cukup Baik, namun Non Keuangan yang belum tersedia. Sebagian besar Laporan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi tidak membuat Rencana Strategi Jangka Panjang secara rinci. RBB yang telah dibuat, pencapaiannya belum optimal. Ada beberapa Indikator Keuangan yang tidak tercapai.

Pontianak, 22 Januari 2025

Disetujui oleh:



Hasan
Direktur Utama



H. Nursalam
Komisaris Utama

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

1. Penambahan atau Pengurangan Kegiatan Usaha

Dalam Tahun 2024 BPR Cahra tidak ada melakukan Penambahan atau Pengurangan Kegiatan Usaha.

2. Penyesuaian Jaringan Kantor

Dalam Tahun 2024 BPR Cahra tidak ada penambahan atau pengurangan Jaringan Kantor.

3. Perubahan Lingkungan Bisnis

Perubahan lingkungan bisnis adalah suatu pergeseran, perubahan atau evolusi yang terjadi dalam faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada lingkungan bisnis, jika menyangkut masalah kebijakan atau ketentuan regulasi bidang keuangan, maka lingkungan bisnis yang dijalankan oleh dunia perbankan khususnya BPR juga akan terpengaruh.

Dalam tahun 2024, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang membuat perubahan lingkungan bisnis BPR, diantaranya adalah :

- a) Kebijakan Pemerintah.
- b) Perubahan trend pasar.
- c) Perkembangan teknologi.
- d) Perubahan dalam perilaku konsumen.

Khusus untuk Perkembangan Teknologi, hal ini berkaitan erat dengan Perubahan dalam Perilaku Konsumen, dalam tahun 2024 ada beberapa pusat perbelanjaan khususnya yang masih tradisional mengalami kerugian akibat dari sepi pengunjung pasar tersebut, tentu saja akan mempengaruhi kondisi usaha BPR. Hal ini terjadi karena perubahan perilaku konsumen yang lebih banyak memilih belanja secara online, tentu saja hal ini menjadikan penurunan omzet pedagang tradisional, dengan demikian pangsa pasar bisnis BPR sedikit banyak akan berpengaruh.

Untuk mengatasi hal ini, maka BPR wajib membuat langkah-langkah guna menghadapi perubahan lingkungan bisnisnya, dengan cara :

- a) Pemantauan Trend dan Perkembangannya.
- b) Perencanaan Strategis dalam Penyaluran Kredit.
- c) Melakukan Diversifikasi atau Inovasi dalam Produk Penghimpunan Dana.
- d) Meningkatkan Pelayanan.
- e) Menjalin Hubungan Baik kepada Pihak yang memiliki Potensi.

B. Perubahan Penting Lainnya

Informasi mengenai perubahan penting BPR dan/atau Kelompok Usaha BPR.

Dalam tahun 2024 tidak ada perubahan yang penting yang dapat mengubah kondisi BPR secara signifikan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Bisnis di Era Digital

Dalam Tahun 2024 Staf Marketing telah melakukan Pengembangan Bisnis secara Digital melalui Sosial Media Marketing dan Content Marketing melalui Media Sosial yang dimiliki oleh Staf Marketing tersebut.

2. Penguatan Permodalan

Dalam Tahun 2024 BPR Cakhra dalam melakukan Penguatan Permodalan melalui pemupukan modal dari Laba Tahun Lalu dan Laba Tahun Berjalan, belum ada rencana penambahan modal dari para Pemegang Saham, namun secara lisan Pemegang Saham Pengendali akan melakukan penyetoran modal jika BPR dalam kondisi kekurangan likuiditas atau minimal dengan penempatan dananya dalam bentuk deposito.

3. Strategi untuk Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola

Strategi Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko di BPR Cakhra :

1) Identifikasi Risiko

Langkah awal yang telah dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi atas pemberian kredit.

2) Penilaian Risiko

Setiap bulan dilakukan analisis atas penyumbang NPL, hal ini terbagi dalam 2 hal, yaitu dilihat dari Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi.

3) Tanggapan Risiko

Tujuan dengan adanya Tanggapan Risiko adalah agar penyumbang NPL yang dilihat dari Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi harus diseleksi dan dianalisa secara mendalam dengan memberikan persyaratan yang dapat memberikan keyakinan kepada pemutus kredit.

Strategi Tata Kelola :

Tetap menjalankan prinsip keterbukaan, dapat memberikan penilaian dan respon atas penilaian, dapat dipertanggungjawabkan semua yang dijelaskan, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan informasi atau laporan yang disajikan dalam koridor kewajaran.

4. Strategi Pemasaran

1) Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera (BPR Cakhra) serta mendukung akan persaingan usaha jasa keuangan, dimana posisi BPR Cakhra berhadapan langsung dengan bank-bank umum dan sektor usaha jasa keuangan mikro non perbankan, maka BPR Cakhra tetap mengedepankan layanan, inovasi produk, penyederhanaan proses dan konektivitas antar bagian.

2) Konektivitas antar bagian atau antar divisi tetap dijalankan dengan strategi komunikasi, karena hal ini dipandang cukup efektif dalam mendukung peningkatan kinerja BPR, namun demikian pencahangan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan profesional setiap individu yang ada di BPR Cakhra perlu diperbaiki dan disempurnakan agar tetap memberikan solusi dalam persaingan yang sangat kompetitif dan akhirnya diharapkan dapat mendukung Perkembangan dan Peningkatan Pendapatan BPR.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

- 3) Peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan secara internal maupun yang dilakukan pihak eksternal, hal ini guna menciptakan konektivitas antar bagian, konektivitas antar individu dan akhirnya dapat lebih mudah melakukan konektivitas kepada nasabah maupun calon nasabah.
- 4) Selain itu, BPR Cakhra tetap mengkaji Nilai-Nilai Perusahaan, yaitu Integritas, Customer dan Passion dengan rincian Integritas mengandung makna bahwa Suatu Tindakan yang dilakukan Insan BPR Cakhra dapat dipertanggungjawabkan atau dengan bahasa lain bahwa Tanggungjawab melebihi dari suatu Tindakan. Customer adalah bagaimana Insan BPR Cakhra dapat memperlakukan para pelanggan/nasabah/calon nasabah BPR Cakhra dengan sepenuh hati dan dapat menjadi pendengar yang baik kemudian dapat memberikan solusi yang diperlukan oleh pelanggan/nasabah atau calon nasabah. Passion adalah suatu hasrat atau kemauan dalam melakukan suatu kerja dengan baik yang telah tercipta dalam setiap Insan BPR Cakhra yang telah menjadi Habit atau kebiasaan.

5. Arah Kebijakan dalam Penguatan Usaha BPR

- 1) Penguatan dan Penyempurnaan Struktur Organisasi melalui Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan serta Mengevaluasi SDM secara Kuantitatif dan Kualitatif.
- 2) Mengakrabkan Staf, khususnya bidang marketing dengan dunia digital marketing dan melengkapi dengan Pendukung dalam Teknologi Informasi.
- 3) Membangun kekuatan marketing dalam lingkung wilayah tertentu, melalui kolaborasi dan kerja sama (Penyaluran Kredit Sindikasi).
- 4) Pengawasan secara Kontinuitas dan Intensif.

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Informasi mengenai Penggunaan Teknologi Informasi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasional

1. Sistem yang digunakan dalam mendukung Pengembangan Produk dan Layanan di BPR Cakhra.
BPR Cakhra menggunakan Core Banking System (CBS) dari PT. USSI untuk mendukung pengembangan produk dan layanan. Sistem ini memungkinkan layanan perbankan terintegrasi, meningkatkan efisiensi operasional dan menjamin keamanan data nasabah. Dengan CBS ini, BPR Cakhra dapat meningkatkan kemampuan dalam menarik data, memberikan pinjaman dan menawarkan layanan berbasis biaya, sehingga dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan nasabah secara efektif.
2. Kelebihan Core Banking System yang saat ini digunakan :
 - a) Integrasi Layanan
Memungkinkan akses layanan perbankan secara terintegrasi di seluruh cabang, memudahkan nasabah dalam bertransaksi.
 - b) Efisiensi Operasional
Mengurangi waktu dan biaya operasional dengan otomatisasi proses transaksi dan pengelolaan data.
 - c) Keamanan Data
Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah yang sangat penting dalam industry perbankan.
 - d) Pelaporan Yang Akurat
Memfasilitasi pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - e) Fasilitas Modern
Menyediakan fitur-fitur modern seperti mobile banking dan QRIS serta dapat meningkatkan kenyamanan nasabah.
3. Kelemahan Core Banking System yang saat ini digunakan :
 - a) Biaya Implementasi
Investasi awal untuk implementasi sistem cukup tinggi termasuk biaya pelatihan dan pemeliharaan.
 - b) Ketergantungan pada Penyedia Jasa
Jika terjadi gangguan teknis atau downtime, layanan perbankan dapat terhambat.
 - c) Kebutuhan Pelatihan
Staf IT dan pengguna harus memperoleh pelatihan yang memadai guna dapat menjalankan sistem dengan baik dan sempurna, hal ini tentu saja membutuhkan biaya, waktu dan sumber daya.
 - d) Risiko Keamanan Siber
Meskipun sistem dirancang untuk aman, namun tidak menutup kemungkinan adanya serangan siber dan hal ini tentu harus memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus.

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

e) Keterbatasan Kustomisasi

Beberapa sistem mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kustomisasi (*Kustomisasi adalah proses mengubah produk, layanan atau pengalaman agar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan*) sesuai dengan kebutuhan spesifik BPR.

4. Prioritas Pengembangan Core Banking System

BPR Cakhra memprioritaskan pengembangan core banking system dengan fokus pada beberapa aspek penting :

- a) Keamanan data yang menjadi prioritas utama, dimana BPR Cakhra akan meningkatkan perlindungan informasi nasabah melalui teknologi keamanan terbaru dan melakukan audit secara berkala.
- b) Otomatisasi proses operasional juga menjadi perhatian khusus, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan transaksi dan manajemen risiko.
- c) Selain itu, BPR Cakhra berkomitmen untuk menawarkan produk dan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, menggunakan analisis data untuk memahami preferensi mereka.

Untuk mendukung semua itu, pelatihan berkelanjutan bagi staf IT dan pengguna harus diberikan secara berkala dan terus menerus agar dapat menggunakan sistem secara optimal. Selain itu, BPR Cakhra akan memastikan bahwa semua pengembangan sistem mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya yang terkait, guna menjaga transparansi dan kepatuhan dalam setiap aspek operasional.

B. Sistem Keamanan

Sistem keamanan Core Banking System yang saat ini digunakan BPR Cakhra telah dirancang untuk melindungi data dan transaksi nasabah dengan baik, karena BPR Cakhra saat ini hanya 1(satu) kantor dan belum memiliki cabang atau kantor kas, maka masih menggunakan sistem lokal, kondisi keamanan masih terjaga dan terkendali.

Dengan infrastruktur lokal, BPR Cakhra dapat lebih mudah mengelola dan mengawasi sistem, mengurangi risiko dari akses jarak jauh. BPR Cakhra menerapkan berbagai langkah keamanan, termasuk penggunaan firewall dan perangkat lunak antivirus untuk melindungi dari ancaman siber. Data nasabah juga di-enkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi.

Kontrol akses berbasis peran memastikan hanya staf yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitive. BPR Cakhra melakukan audit dan pemantauan rutin untuk mendeteksi potensi ancaman serta memberikan pelatihan kepada staf mengenai praktek keamanan yang baik.

Meskipun saat ini BPR Cakhra belum meng-online-kan layanan, namun tetap melakukan backup data setiap harinya setelah melakukan end of day.

Dengan langkah-langkah ini, BPR Cakhra ada suatu keyakinan bahwa sistem keamanan CBS yang digunakan berjalan secara efektif dan aman, namun demikian tetap memantau dan meningkatkan keamanan seiring dengan perkembangan teknologi.

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

C. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

PT. USSI yang berkedudukan di Kota Bandung, kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. BPR Tamara Dana Khatulistiwa (sekarang berubah nama menjadi PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera) dengan PT. USSI tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Core Banking IBS Realtime.

Penggunaan Core Banking System dari PT USSI ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017.

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha

1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

No.	Jenis Produk	Posisi Tahun		Pertumbuhan	
		2024	2023	Nominal	%
1	Tabungan Cakhra Inti	4.171.615.205	4.610.584.679	(438.969.474)	-9.52%
2	Tabungan Cakhra Bisnis	1.097.393.015	1.016.522.016	80.870.999	7.96%
3	Tabungan Cakhra Junior	285.204.083	308.597.454	(23.393.371)	-7.58%
4	Tabungan Cakhra Rencana	-	1.500.000	(1.500.000)	-100.00%
Jumlah Tabungan		5.554.214.327	5.937.206.172	(382.991.845)	-6.45%
5	Deposito JW 1 Bulan	13.761.113.781	11.611.663.939	2.149.449.842	18.51%
6	Deposito JW 3 Bulan	15.248.362.834	18.392.674.577	(3.144.311.743)	-17.10%
7	Deposito JW 6 Bulan	15.346.189.232	15.491.821.095	(145.631.863)	-0.94%
8	Deposito JW 12 Bulan	-	-	-	0.00%
Jumlah Deposito		44.355.665.847	45.496.159.611	(1.140.493.764)	-2.51%

2. Penyaluran Kredit

No.	Jenis Kredit	Posisi Tahun		Pertumbuhan	
		2024	2023	Nominal	%
1	PRK	19,003,235,076	15,268,287,349	3,734,947,727	24.46%
2	DL	-	-	-	
3	KMK-Angsuran	6,078,233,246	8,522,029,841	(2,443,796,595)	-28.68%
4	FL	595,064,950	665,032,950	(69,968,000)	-10.52%
Jumlah KMK		25,676,533,272	24,455,350,140	1,221,183,132	4.99%
5	KI	6,926,017,474	9,575,764,750	(2,649,747,276)	-27.67%
Jumlah KI		6,926,017,474	9,575,764,750	(2,649,747,276)	-27.67%
6	KPR	14,046,900,506	14,577,657,124	(530,756,618)	-3.64%
7	KKB	600,401,194	385,294,646	215,106,548	55.83%
8	KAM	6,591,716,480	6,566,842,130	24,874,350	0.38%
9	KK	74,858,336	5,833,332	69,025,004	1183.29%
Jumlah Kredit Konsumsi		21,313,876,516	21,535,627,232	(221,750,716)	-1.03%
Jumlah Kredit Yang Diberikan		53,916,427,262	55,566,742,122	(1,650,314,860)	-2.97%

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

3. NPL Berdasarkan Jenis Kredit

No.	Jenis Kredit	Nominal NPL	% NPL
1	PRK	900.000.000	1.67%
2	KMK-Angsuran	2.029.641.736	3.76%
3	FL	1.357.545.787	2.52%
4	KI	992.349	0.00%
5	KPR	2.988.348.819	5.54%
6	KAM	1.786.445.794	3.31%
Jumlah NPL Tahun 2024		9.062.974.485	16.81%

4. Penyaluran Kredit Berdasarkan 5(lima) Sektor Ekonomi Terbesar

No.	Sektor Ekonomi	BD Gross	Nominal NPL	% NPL
1	Rumah Tangga Untuk KPR Rumah Type di atas 70	9.538.972.693	1.677.592.666	3.11%
2	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	5.291.230.633	-	0.00%
3	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi	5.220.397.122	1.404.839.990	2.61%
4	Rumah Tangga Untuk KPR Rumah Type 21 s/d 70	4.835.238.235	2.842.444.468	5.27%
5	Konstruksi Gedung Lainnya	4.507.927.813	382.628.489	0.71%
Jumlah NPL Tahun 2024		29.393.766.496	6.307.505.613	11.70%

B. Target Pasar

1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Target Pasar dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga khusus Tabungan adalah melakukan modifikasi Produk Tabungan Cakhra Inti dengan memberikan Hadiah langsung kepada Penabung dengan wajib melakukan penyetoran sejumlah dana yang telah ditentukan oleh BPR Cakhra dan wajib diblokir dananya sesuai dengan kesepakatan antara Penabung dan BPR Cakhra. Selain itu, guna mengupayakan adanya Peningkatan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk Tabungan dengan cara atau strategi inovasi produk tabungan dengan mempromosikan tingkat bunga yang kompetitif serta pelayanan “jemput bola” baik penyetoran maupun saat pembukaan rekening tabungan baru. Sedangkan untuk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk Deposito, BPR Cakhra tidak terlalu fokus karena dalam tahun 2024 lebih pada Penghimpunan Dana Murah.

2. Penyaluran Kredit

Target Pasar untuk Penyaluran Kredit, BPR Cakhra menyerahkan strategi penentuan pasar sasaran dari setiap marketing lending masing-masing, hal ini dimaksudkan agar target pasar yang menjadi sasaran marketing lending sudah biasa dilakukan sehingga marketing lending tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produk-produk kredit tersebut.

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Berikut ini adalah lampiran dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun Laporan Tahunan :

NERACA
PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Perkiraan	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset		
Kas	356.852.900	375.207.600
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	542.424.361	380.628.515
Penempatan Pada Bank Lain	7.888.768.657	5.055.108.402
-/- Penyisihan Kerugian	(25.015.581)	-
Kredit Yang Diberikan	53.916.427.262	55.566.742.122
-/- Penyisihan Kerugian	(1.730.824.200)	(1.586.115.295)
-/- Provisi & Admin. Yang Ditangguhkan	(441.467.410)	(492.787.257)
Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	1.675.947.984	1.675.947.984
Aset Tetap dan Inventaris	1.298.245.650	806.279.650
-/- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	(762.517.487)	(711.550.818)
Aset Tidak Berwujud	111.700.000	111.700.000
-/- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(111.699.998)	(111.699.998)
Aset Lain-Lain	150.717.309	70.463.664
Jumlah Aset :	62.869.559.447	61.139.924.569
Kewajiban		
Kewajiban Segera Dibayar	244.046.065	442.121.794
Utang Bunga	136.137.464	135.766.801
Utang Pajak	104.225.824	40.326.650
Simpanan dari Pihak Ketiga – Tabungan	5.554.189.853	5.936.944.320
Simpanan dari Pihak Ketiga – Deposito	44.355.665.847	45.496.159.611
Simpanan dari Bank Lain	-	-
Pinjaman Diterima	2.654.143.062	-
Kewajiban Imbalan Kerja	618.568.343	524.218.343
Kewajiban Lain-Lain	-	-
Jumlah Kewajiban :	53.666.976.458	52.575.537.519
Ekuitas		
Modal Disetor	8.000.000.000	8.000.000.000
Laba (Rugi) Tahun Lalu	564.387.050	54.758.468
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	638.195.939	509.628.582
Jumlah Ekuitas :	9.202.582.989	8.564.387.050
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas :	62.869.559.447	61.139.924.569

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

LAPORAN LABA-RUGI PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Perkiraan	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Operasional		
Bunga dari Bank Lain – Giro	50.785.590	138.569.205
Bunga dari Bank Lain – Tabungan	25.235.457	10.336.053
Bunga dari Bank Lain – Deposito	616.274.358	453.875.273
Bunga dari Kredit Yang Diberikan	6.670.926.357	6.283.141.703
Provisi Kredit & Administrasi Kredit	345.024.047	281.324.519
Pendapatan Operasional Lainnya	376.250.048	271.780.326
Jumlah Pendapatan Operasional :	8.084.495.857	7.439.027.079
Beban Operasional		
Bunga DPK – Tabungan	127.292.603	197.770.072
Bunga DPK – Deposito	2.986.166.855	2.385.645.388
Bunga atas Pinjaman Diterima	11.248.366	-
Beban LPS	123.893.834	103.286.428
Beban Hadiah Langsung	417.278	4.235.087
Beban PPKA	195.302.909	547.929.008
Beban Penyusutan ATI & ATB	50.966.669	45.828.730
Beban Tenaga Kerja	2.637.635.398	2.577.513.452
Beban Pendidikan	173.901.882	122.015.200
Beban Premi Asuransi Kantor	8.559.534	7.650.850
Beban Sewa	454.300.000	366.300.000
Beban Pajak	81.735.865	6.130.823
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	30.473.105	113.432.305
Beban Barang dan Jasa	268.766.639	275.735.257
Beban Promosi dan Pemasaran	60.460.650	38.501.605
Beban Lainnya	39.957.564	6.500.158
Jumlah Beban Operasional :	7.251.079.151	6.798.474.363
Laba (Rugi) Operasional :	833.416.706	640.552.716
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	4.453.284	1.255.187
Beban Non Operasional	24.715.074	584.753
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional :	(20.261.790)	670.434
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	813.154.916	641.223.150
Taksiran Pajak Penghasilan	(174.958.976)	(131.594.568)
Laba (Rugi) Setelah Pajak :	638.195.939	509.628.582

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Keterangan	Modal	Saldo Laba			Jumlah
	Modal Disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Blm Ditetapkan Tujuannya	
Saldo Per 31.12.2017	8.000.000.000	-	-	(365.877.493)	7.634.122.507
Posisi Tahun 2018 :					
Penambahan (Kelebihan) Pajak					
Pengurangan					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				(316.783.487)	(316.783.487)
Saldo Per 31.12.2018	8.000.000.000	-	-	(682.660.980)	7.317.339.020
Posisi Tahun 2019 :					
Penambahan (Kelebihan) Pajak					
Pengurangan					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				202.142.827	202.142.827
Saldo Per 31.12.2019	8.000.000.000	-	-	(480.518.153)	7.519.481.847
Posisi Tahun 2020 :					
Penambahan (Kelebihan) Pajak					
Pengurangan					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				(774.004.240)	(774.004.240)
Saldo Per 31.12.2020	8.000.000.000	-	-	(1.254.522.393)	(6.745.477.607)
Posisi Tahun 2021 :					
Penambahan (Kelebihan) Pajak					
Pengurangan					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				746.228.058	746.228.058
Saldo Per 31.12.2021	8.000.000.000	-	-	(508.294.335)	7.491.705.665
Posisi Tahun 2022 :					
Penambahan (Kelebihan) Pajak					
Pengurangan					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				563.052.802	563.052.802
Saldo Per 31.12.2022	8.000.000.000	-	-	54.758.468	8.054.758.468
Posisi Tahun 2023 :					
Penambahan (Kelebihan) Pajak					
Pengurangan					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				509.628.582	509.628.582
Saldo Per 31.12.2023	8.000.000.000	-	-	564.387.050	8.564.387.050
Posisi Tahun 2024 :					
Penambahan (Kelebihan) Pajak					
Pengurangan					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan				638.195.939	637.643.981
Saldo Per 31.12.2024	8.000.000.000	-	-	1.202.582.989	9.202.031.031

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

LAPORAN ARUS KAS PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Perkiraan	Tahun 2024	Tahun 2023
Laba (Rugi) Netto	638.195.939	509.628.582
Penyesuaian untuk Merekonsiliasi Laba Netto		
Penyusutan Aset Tetap	50.966.669	45.828.730
Penyisihan kerugian (Pembalikan atas Penyisihan) untuk :		
- Penempatan Pada Bank Lain (selain Giro)	25.015.581	-
- Kredit Yang Diberikan	144.708.904	518.868.475
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
Provisi & Admin. Kredit Yang Ditangguhkan	(51.319.847)	90.573.868
Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan	-	-
Laba Netto Setelah Penyesuaian Transaksi Non Kas :	807.567.247	1.164.899.655
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasional		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(161.795.846)	(43.318.104)
Penempatan Pada Bank Lain	(2.833.660.254)	6.196.131.056
Kredit Yang Diberikan	1.650.314.860	(11.130.005.025)
Aset Yang Diambil Alih	-	-
Kredit Restrukturisasi	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-Lain	(80.253.645)	(23.622.885)
Kewajiban Segera	(198.075.729)	40.418.306
Utang Bunga	370.663	39.142.272
Utang Pajak	63.899.174	30.307.880
DPK – Tabungan	(382.754.467)	(5.388.408.877)
DPK – Deposito	(1.140.493.764)	9.101.233.922
Antar Bank Pasiva/Pinjaman Yang Diterima	2.654.143.062	-
Kewajiban Imbalan Kerja	94.350.000	68.176.000
Kewajiban Lain-Lain	-	-
Arus Kas Netto dari Aktivitas Operasional :	473.611.300	(1.109.945.455)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian Aset Tetap dan Inventaris	(491.966.000)	(60.239.000)
Pembelian Aset Tidak Berwujud	-	-
Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi :	(491.966.000)	(60.239.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Cadangan PPKA	-	-
Arus Kas Netto dari Aktivitas Pendanaan :	-	-
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas :	(18.354.700)	(5.284.800)
Posisi Kas Awal Periode :	375.207.600	380.492.400
Posisi Kas Akhir Periode :	356.852.900	375.207.600

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Posisi Per 31 Desember 2024

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen	Nominal	PPAP Khusus	Nominal stlh Dikurangi PPAP Khusus	Bobot Risiko (%)	ATMR
1.	Kas	356.852.900			0%	-
2.	Kredit Back to Back	5.293.110.819	-	-	0%	-
3.	AYDA lebih dari 1 tahun	1.675.947.984	-	-	0%	-
4.	Penempatan Pada Bank Lain	7.888.768.657	-	7.888.768.657	20%	1.577.753.731
5.	Kredit Dengan HT	41.477.924.704	-	41.477.924.704	30%	12.443.377.411
6.	Kredit Tanpa HT	51.591.226	-	51.591.226	50%	25.795.613
7.	Kredit Dengan FEO	713.981.903	-	713.981.903	70%	499.787.332
8.	Kredit Lainnya	29.563.335	-	29.563.335	100%	29.563.335
9.	Kredit Telah Jatuh Tempo	2.357.614.321	748.564.282	1.609.050.039	100%	1.609.050.039
10.	Kredit Kolektibilitas Macet	3.551.173.544	787.363.013	2.763.810.531	100%	2.763.810.531
11.	Aktiva Tetap & Inventaris	535.728.163			100%	535.728.163
12.	Aktiva Tidak Berwujud	2			100%	2
13.	Aset Lainnya	693.141.670			100%	693.141.670
		64.625.399.228				
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum :						20.178.007.827

Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum

Komponen Permodalan	Jumlah Setiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah
Modal Inti :			
Modal Inti Utama :			
Modal Disetor	8.000.000.000	100%	8.000.000.000
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	564.387.050	100%	564.387.050
Laba Tahun Berjalan(-)Kekurangan PPAP(-) Utang PPh	638.195.939	50%	319.097.970
Rugi Tahun Berjalan(-)Kekurangan PPAP	-	100%	-
AYDA Melampaui JW 1 s/d 3 tahun (-)	(1.355.620.877)	15%	(203.343.132)
AYDA Melampaui JW 3 s/d 5 tahun (-)	(320.327.107)	50%	(160.163.554)
AYDA Melampaui JW 5 tahun (-)	-	100%	-
Jumlah Modal Inti Utama :			8.519.978.334
Modal Inti Tambahan	-	100%	-
Jumlah Modal Inti :			8.519.978.334
Modal Pelengkap :			
PPAP Umum atau Paling Tinggi 1,25% dari ATMR			218.331.581
Jumlah Modal :			8.738.309.915
ATMR :			20.178.007.827
		Rasio KPMM :	
	Jumlah Modal : ATMR		43,31%
		Rasio Modal Inti :	
	Jumlah Modal Inti : ATMR		42,22%

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Posisi Per 31 Desember 2023

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen	Nominal	PPAP Khusus	Nominal stlh Dikurangi PPAP Khusus	Bobot Risiko (%)	ATMR
1.	Kas	375.207.600			0%	-
2.	Kredit Back to Back	3.926.513.116	-	-	0%	-
3.	AYDA lebih dari 1 tahun	1.675.947.984	-	-	0%	-
4.	Penempatan Pada Bank Lain	5.055.108.402	-	5.055.108.402	20%	1.011.021.680
5.	Kredit Dengan HT	44.469.608.607	-	44.469.608.607	30%	13.340.882.582
6.	Kredit Tanpa HT	104.888.767	-	104.888.767	50%	52.444.384
7.	Kredit Dengan FEO	608.751.596	-	608.751.596	70%	426.126.117
8.	Kredit Lainnya	5.824.995	-	5.824.995	100%	5.824.995
9.	Kredit Telah Jatuh Tempo	3.223.309.327	636.160.341	2.587.148.986	100%	2.587.148.986
10.	Kredit Kolektibilitas Macet	2.735.058.457	738.080.954	1.996.977.503	100%	1.996.977.503
11.	Aktiva Tetap & Inventaris	94.728.832			100%	94.728.832
12.	Aktiva Tidak Berwujud	2			100%	2
13.	Aset Lainnya	451.092.179			100%	451.092.179
14.		62.726.039.864				
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum :						19.966.247.260

Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum

Komponen Permodalan	Jumlah Setiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah
Modal Inti :			
Modal Inti Utama :			
Modal Disetor	8.000.000.000	100%	8.000.000.000
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	54.758.468	100%	54.758.468
Laba Tahun Berjalan(-)Kekurangan PPAP(-) Utang PPh	509.628.583	50%	254.814.291
Rugi Tahun Berjalan(-)Kekurangan PPAP	-	100%	-
AYDA Melampaui JW 1 s/d 3 tahun (-)	(1.675.947.984)	15%	(837.973.992)
AYDA Melampaui JW 3 s/d 5 tahun (-)	-	50%	-
AYDA Melampaui JW 5 tahun (-)	-	100%	-
Jumlah Modal Inti Utama :			7.471.598.767
Modal Inti Tambahan	-	100%	-
Jumlah Modal Inti :			7.471.598.767
Modal Pelengkap :			
PPAP Umum atau Paling Tinggi 1,25% dari ATMR			211.874.000
Jumlah Modal :			7.683.472.767
ATMR :			19.966.247.260
Rasio KPMM :			
Jumlah Modal : ATMR			38,48%
Rasio Modal Inti :			
Jumlah Modal Inti : ATMR			37,42%

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Posisi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Keterangan	Kredit	ABA	Total 2024	Total 2023
1.	Aktiva Produktif				
	1) Lancar	43.942.725.468	7.863.753.076	51.806.478.544	51.360.884.805
	2) Dalam Perhatian Khusus	910.727.309	-	910.727.309	708.950.638
	3) Kurang Lancar	834.111.572	-	834.111.572	1.022.915.934
	4) Diragukan	2.306.253.082	-	2.306.253.082	1.563.958.075
	5) Macet	5.922.609.831	-	5.922.609.831	5.965.141.072
	Jumlah :	53.916.427.262	7.863.753.076	61.780.180.338	60.621.850.524
2.	APYD				
	1) Kurang Lancar (50%)	417.055.786	-	417.055.786	511.457.967
	2) Diragukan (75%)	1.729.689.812	-	1.729.689.812	1.172.968.556
	3) Macet (100%)	5.922.609.831	-	5.922.609.831	5.965.141.072
	Jumlah :	8.069.355.429	-	8.069.355.429	7.649.567.595
3.	Agunan Yang Diperhitungkan				
	Lancar	-	-	-	-
	Dalam Perhatian Khusus	1.228.114.249	-	1.228.114.249	841.762.993
	Kurang Lancar	1.070.762.993	-	1.070.762.993	1.417.976.343
	Diragukan	2.380.000.000	-	2.380.000.000	1.785.049.416
	Macet	4.386.668.968	-	4.386.668.968	1.032.000.000
	Jumlah :	9.065.546.210	-	9.065.546.210	5.076.788.752
4.	PPAPWD stlh diperhitungkan dengan Agunan				
	1) Lancar	194.883.337	25.015.581	219.898.918	211.814.381
	2) Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-
	3) Kurang Lancar	-	-	-	-
	4) Diragukan	-	-	-	-
	5) Macet	1.535.940.863	-	1.535.940.863	1.374.239.967
	Jumlah :	1.730.824.200	25.015.581	1.755.839.781	1.586.054.348
5.	Rasio Keuangan				
	Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan		8.069.355.429		
	Aktiva Produktif		61.805.195.919	13,06%	12,62%
	PPAP Yang Telah Dibentuk		1.755.839.781		
	PPAP Yang Wajib Telah Dibentuk		1.755.839.781	100,00%	100%
	NPL Bruto :		9.062.974.485		8.552.015.081
	Rasio NPL Bruto :		16,81%		15,39%
	NPL Netto :		7.527.033.622		7.177.773.786
	Rasio NPL Netto :		13,96%		12,92%
6.	PPAP Yang Telah Dibentuk :		1.755.839.781		1.586.054.348
	PPAP Yang Wajib Dibentuk :		1.755.839.781		1.586.115.295
	PPAP (Kurang)/Lebih Bentuk :		-		(60.947)

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

ROA dan BOPO PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Posisi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Bulan	Total Aset 2024	Total Aset 2023
1.	Januari	62.946.749.178	56.211.104.986
2.	Februari	74.330.398.052	56.113.879.952
3.	Maret	76.317.300.266	56.550.655.662
4.	April	76.408.519.947	63.823.143.734
5.	Mei	76.980.000.041	61.774.867.010
6.	Juni	72.517.917.977	64.633.532.139
7.	Juli	73.290.151.718	62.971.665.470
8.	Agustus	71.369.336.182	68.454.090.999
9.	September	72.951.122.841	68.390.812.778
10.	Oktober	67.660.624.857	62.343.681.137
11.	November	69.080.488.804	63.249.309.282
12.	Desember	62.869.559.447	61.139.924.569
	Jumlah :	856.722.169.308	745.656.667.718
	Rata-Rata Aset :	71.393.514.109	62.138.055.643
	Laba Sebelum Pajak :	813.154.915	641.223.151
	ROA :	1,14%	1,03%
	Total Beban Operasional :	7.251.079.151	6.798.474.363
	Total Pendapatan Operasional :	8.084.495.856	7.439.027.079
	BOPO :	89,69%	91,39%

CASH RATIO PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Posisi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Aset Lancar		
	a) Kas	356.852.900	375.207.600
	b) Antar Bank Aktiva		
	- Giro	1.862.131.673	1.684.084.027
	- Tabungan	26.636.984	871.024.375
	- Dikurangi Tabungan ABP	-	-
	Jumlah Aset Lancar :	2.245.621.557	2.930.316.002
2.	Utang Lancar		
	a) Kewajiban Segera	244.046.065	442.121.794
	b) Simpanan dari Pihak Ketiga		
	- Tabungan	5.554.212.304	5.937.204.149
	- Deposito	44.355.665.847	45.496.159.611
	Jumlah Utang Lancar :	50.153.924.216	51.875.485.554
	Cash Ratio :	4,48%	5,65%

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

LOAN to DEPOSIT RATIO (LDR) PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Posisi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Simpanan Pihak Ketiga		
	- Tabungan	5.554.212.304	5.937.204.149
	- Deposito	44.355.665.847	45.496.159.611
2.	Pinjaman Diterima lebih dari 3 Bulan	2.654.143.062	-
3.	Modal Pinjaman	-	-
4.	Modal Inti	-	-
5.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-
	Jumlah Dana Yang Diterima :	52.564.021.213	51.433.363.760
6.	Aktiva Produktif (selain ABA)		
	- Kredit Yang Diberikan	53.916.427.262	55.566.742.122
	- Kredit Yang Diberikan Kepada Bank Lain	-	-
	- Lainnya	-	-
	Jumlah Aktiva Produktif :	53.916.427.262	55.566.742.122
	LDR (Aktiva Produktif : Dana Yang Diterima) :	102,57	108,04%

RASIO-RASIO UTAMA PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Keterangan - Rasio	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	43,31%	38,48%
2.	Modal Inti terhadap ATMR	42,22%	37,42%
3.	Kualitas Aset Produktif (KAP)	13,06%	12,62%
4.	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	100,00%	100,00%
5.	Return on Asset	1,14%	1,03%
6.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	89,69%	91,39%
7.	Cash Ratio	4,48%	5,65%
8.	Loan to Deposit Ratio	102,57%	108,04%
9.	NPL Gross	16,81%	15,39%
10.	NPL Netto	13,96%	12,92%

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023, dapat dilihat dari Dokumen Akuntan Publik.

DOKUMEN AKUNTAN PUBLIK

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Berikut adalah Laporan Akuntan Publik berdasarkan hasil audit untuk Periode Posisi Laporan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Per 31 Desember 2024 dan 2023
dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023**

NERACA
PT BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Kas	2d, 3	356.852.900	375.207.600
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2e,4	542.424.361	380.628.514
Penempatan pada Bank Lain	2f, 5	7.888.768.657	5.055.108.402
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	2h, 5	(25.015.581)	-
Total		8.763.030.336	5.810.944.517
Kredit yang Diberikan	2g, 6	53.916.427.262	55.566.742.122
Provisi & Adm.	2g, 6	(441.467.410)	(492.787.257)
Pendapatan Bunga Ditangguhkan Kredit	2g,	-	-
PPAP Kredit Yang Diberikan	2h, 6	(1.730.824.200)	(1.586.115.295)
Total		51.744.135.652	53.487.839.570
Agunan Yang Diambil Alih	2i, 7	1.675.947.984	1.675.947.984
Aset Tetap dan Inventaris	2j, 8	1.298.245.650	806.279.650
Akum. Peny. Aset Tetap & Inventaris	2j, 8	(762.517.487)	(711.550.818)
Total		535.728.163	94.728.832
Aset Tidak Berwujud	2k, 9	2	2
Aset lain-lain	2l, 10	150.717.309	70.463.664
Total		150.717.311	70.463.666
JUMLAH ASET		62.869.559.447	61.139.924.569
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	2m, 11	244.046.065	442.121.794
Utang Bunga	2n, 12	136.137.464	135.766.801
Utang Pajak	2o, 13	104.225.824	40.326.650
Simpanan	2p, 14	49.909.855.699	51.433.103.930
Simpanan dari Bank Lain	2q, 15	-	0
Pinjaman diterima	2r,	2.654.143.062	0
Kewajiban Imbalan Kerja	2s, 16	618.568.343	524.218.343
JUMLAH KEWAJIBAN		53.666.976.457	52.575.537.519
EKUITAS			
Dana Setoran Modal	2u, 17	32.000.000.000	32.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	2u, 17	(24.000.000.000)	(24.000.000.000)
Total		8.000.000.000	8.000.000.000
Saldo Laba			
Cadangan Umum	2u, 17	564.387.050	54.758.468
Belum ditentukan tujuanya	2u, 17	638.195.939	509.628.582
Total		1.202.582.989	564.387.050
JUMLAH EKUITAS		9.202.582.989	8.564.387.050
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		62.869.559.447	61.139.924.569

Pontianak, 24 April 2025

Hasan
Direktur Utama

Muhammad Purnama
Direktur

LAPORAN LABA RUGI
PT BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual	2v, 18a,b	7.363.221.761	6.885.922.234
Provisi Dan Jasa Administrasi	2v, 18c	345.024.047	281.324.519
Jumlah Pendapatan Bunga		7.708.245.808	7.167.246.753
Beban Bunga	2w, 20	(3.249.018.936)	(2.690.936.975)
Pendapatan Operasional Lainnya	2v, 19	376.250.048	271.780.326
Jumlah Pendapatan Operasional		4.835.476.920	4.748.090.104
Beban Operasional			
Beban Penyisihan Kerugian	2w, 21a	195.302.909	547.929.008
Beban Pemasaran	2w, 21b	60.460.650	38.501.605
Beban Administrasi dan Umum	2w, 21c	3.706.339.092	3.493.656.061
Beban Operasional Lainnya	2w, 21d	39.957.564	27.450.714
Jumlah Beban Operasional		4.002.060.215	4.107.537.388
Laba (Rugi) Operasional		833.416.705	640.552.717
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	2x, 22	4.453.284	1.255.187
Beban Non Operasional	2y, 22	(24.715.074)	(584.753)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(20.261.790)	670.434
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		813.154.915	641.223.151
Taksiran Pajak Penghasilan		174.958.976	131.594.568,06
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		638.195.939	509.628.582

Pontianak, 24 April 2025

Hasan
Direktur Utama

Muhammad Purnama
Direktur

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PT BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal		Saldo Laba			Jumlah
	Modal Disetor	Tambahan Modal	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum Ditentukan	
Saldo per 31 Desember 2022	8.000.000.000	-	-	-	54.758.468	8.054.758.468
Tambahan Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-
Pembagian Bonus Karyawan	-	-	-	-	-	-
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	-	509.628.582	509.628.582
Saldo per 31 Desember 2023	8.000.000.000	-	-	-	564.387.050	8.564.387.050
Tambahan Cadangan Umum						-
Pembagian Bonus Karyawan					-	-
Laba rugi tahun berjalan					638.195.939	638.195.939
Saldo per 31 Desember 2024	8.000.000.000	-	-	-	1.202.582.990	9.202.582.990

LAPORAN ARUS KAS
PT BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA
 Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Neto	638.195.939	509.628.582
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih		
Penyusutan aset tetap	50.966.669	45.828.730
Penyisihan kerugian		
Penempatan pada bank lain	25.015.581	-
Kredit	144.708.905	518.868.475
Amortisasi aset tidak berwujud	-	-
Provisi dan Administrasi	(51.319.847)	90.573.868
Akrual	-	-
Laba Neto Setelah Penyesuaian Transaksi Non Kas	807.567.247	1.164.899.655
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi		
Penempatan Pada Bank Lain	(2.833.660.254)	6.196.131.056
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(161.795.846)	(43.318.104)
Kredit Yang Diberikan	1.650.314.860	(11.130.005.025)
Agunan Yang Diambil Alih	-	-
Aset Lain-lain	(80.253.645)	(23.622.885)
Kewajiban Segera Dibayar	(198.075.729)	40.418.306
Utang Bunga	370.663	39.142.272
Utang Pajak	63.899.174	30.307.880
Simpanan	(1.523.248.232)	3.712.825.045
Simpanan dari Bank Lain	-	-
Pinjaman Yang Diterima	2.654.143.062	-
Kewajiban Imbalan Kerja	94.350.000	68.176.000
Kewajiban Lain-lain	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	473.611.300	54.954.200
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(491.966.000)	(60.239.000)
Penjualan aset tetap dan inventaris	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(491.966.000)	(60.239.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Bonus Karyawan	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(18.354.700)	(5.284.800)
KAS AWAL PERIODE	375.207.600	380.492.400
KAS AKHIR PERIODE	356.852.900	375.207.600

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Khatulistiwa Sejahtera untuk selanjutnya disebut PT BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera. PT BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera (d/h PT BPR Tamara Dana Khatulistiwa) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 06 pada tanggal 12 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. di Jalan Tanjungpura No. 353 (Depan Orien Hotel) dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-64687.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Akta tersebut telah dirubah dengan Akta Nomor 11 tanggal 9 Februari 2015 oleh notaris John Ferry, S.H. di Jalan Hijas No 173-B, Pontianak, Kalimantan Barat yang berisi tentang perubahan pemegang saham dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU- 0017957.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 11 Februari 2015.

Akta tersebut telah dirubah dengan Akta No. 41 tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Carolina Anggraini, S.H. di Jalan Arteri Supadio A/9, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang berisi tentang Perubahan Susunan dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. HU- 3560845.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

Akta tersebut telah dirubah dengan Akta No. 08 tanggal 12 Januari 2016 dibuat oleh Notaris John Ferry, S.H. di Jalan Hijas No 173-B, Pontianak, Kalimantan Barat. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0004868.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 14 Januari 2016.

Akta tersebut telah dipertegas dengan Akta Nomor 17 tanggal 28 Juli 2016 oleh notaris John Ferry, S.H. di Jalan Hijas No 173-B, Pontianak, Kalimantan Barat yang berisi tentang perubahan pemegang saham. Akta tersebut telah dirubah dengan Akta No. 02 tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris John Ferry, S.H. di Jalan Hijas No 173-B, Pontianak, Kalimantan Barat yang berisi tentang Perubahan Nama Perseroan menjadi PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0002802.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 06 Februari 2018. Akta tersebut telah diubah dengan Akta No. 08 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris John Ferry, SH di Jalan Hijas No. 173 B, Pontianak, Kalimantan Barat yang berisi tentang Perubahan Menyetujui Perubahan Pasal 11 Ayat 3 dan Pasal 14 Ayat 3 serta Menyetujui Pengangkatan. Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0011411.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019.

b. Tempat dan Kedudukan

PT BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 26-27 Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122. Nomor telepon (0561) 582226, Nomor Faximile (0561) 582227. Email : bprcakra@gmail.com

1. GAMBARAN UMUM (*Lanjutan*)

c. Perizinan Usaha

Dalam melaksanakan usahanya, PT BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera memiliki perijinan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/36/KEP.GBI/DpG/2013 tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera (d/h PT BPR Tamara Dana Khatulistiwa) tanggal 1 April 2013.
- 2) Keputusan Plt. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP.14/KO.0901/2018 tentang Perubahan Nama PT BPR Tamara Dana Khatulistiwa menjadi PT BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera.
- 3) Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 14.03.1.64.03877 tertanggal 11 April 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 09 April 2018. Kemudian diperpanjang dengan izin nomor 14.03.1.64.03877 tertanggal 13 April 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2023.
- 4) Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pontianak Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor : 503/1034/DPMTK/R-III/S/2018 tertanggal 11 April 2018 dan berlaku sampai dengan 11 April 2023.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak 03.268.977.0.701.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat.

d. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3 dijelaskan maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, perusahaan melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang lingkupnya meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
- 2) Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat khususnya pedesaan.
- 3) Satu dan lain tersebut di atas semuanya dalam arti kata seluas-luasnya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

e. Kepemilikan Perusahaan

Anggaran Dasar perusahaan beberapa kali mengalami perubahan terakhir perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 16 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris John Ferry, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0089264.AH.01.11 TAHUN 2016 tanggal 01 Agustus 2016. Akta tersebut telah dipertegas dalam Akta Nomor 17 tanggal 28 Juli 2016 oleh notaris John Ferry, S.H. yang berisi tentang perubahan pemegang saham. dengan rincian kepemilikan saham sebagai berikut:

Nama Pemilik (Pemegang Saham)	2024 dan 2023		
	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Nilai
Alip Hanoky	3.600	45%	3.600.000.000
Charles Ferlani Lim	2.800	35%	2.800.000.000
Apriyanto	1.600	20%	1.600.000.000
Total	8.000	100%	8.000.000.000

1. GAMBARAN UMUM (*Lanjutan*)

f. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Setelah mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan dan terakhir PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera berdasarkan akta notaris No. 17 tanggal 10 Januari 2024 oleh notaris Budi Perasetiyono, S.H, maka susunan pengurus PT BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	Tn. Haji Nursalam	Tn. Haji Nursalam
Komisaris	Tn. Sunadi Harsono	Tn. Tjung Po Sun alias Sunadi Harsono
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	Tn. Hasan	Tn. Hasan
Direktur	Tn. Muhammad Purnama	Tn. Muhammad Purnama

Per 31 Desember 2024 jumlah karyawan perusahaan masing sebanyak 20 Orang Karyawan (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan–Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK–IAI).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

c. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan. Transaksi pihak

- 1) Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya
- 2) Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu
- 3) Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

d. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.

Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

e. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

f. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.

1) Giro pada bank umum

Merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan. Giro diakui sebesar nilai nominal

2) Tabungan pada bank lain

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan diakui sebesar nilai nominal

3) Deposito pada bank lain

Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Deposito diakui sebesar nilai nominal

4) Sertifikat deposito

merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor. Sertifikat deposito diakui sebesar nilai perolehan (nilai nominal dikurangi nilai diskonto). Amortisasi diskonto dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai Pendapatan Bunga.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

f. Penempatan Pada Bank Lain (*lanjutan*)

5) Penempatan pada bank syariah

merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Giro dan tabungan wadiah/mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bonus/bagi hasil diakui secara kas sebesar jumlah yang diterima, sedangkan Deposito mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan laporan bagi hasil bank syariah sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

g. Kredit Yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit.

Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

h. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan (PPAP)

1) PPAP Kredit

Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.

Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan

2) PPAP Penempatan Pada Bank Lain

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tabungan atau deposito tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari tabungan atau deposito tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

i. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

j. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan (*cost*) dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai dengan taksiran sebagai berikut:

Kelompok Aset	Masa Manfaat
Inventaris	4 Tahun
Kendaraan	8 Tahun

Pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba/rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau biaya pada periode bersangkutan.

k. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada). Aset tidak berwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai taksiran masa manfaat.

l. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca

m. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Kewajiban segera diakui pada saat: 1) kewajiban telah jatuh tempo; atau 2) kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak.

n. Utang Bunga

Utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

o. Utang Pajak

Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

p. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

q. Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

1) Tabungan dari bank lain

Tabungan disajikan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan

2) Deposito dari bank lain

i. Deposito disajikan sebesar jumlah nominalnya atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.

ii. Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga

r. Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman Diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Dan disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi.

s. Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerjaan pos tersendiri. Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

t. Kewajiban Lain - Lain

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

u. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban.

Komponen ekuitas dalam BPR terdiri dari:

1) Modal

Modal BPR terbagi atas:

i. Modal Disetor

Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non kas.

Modal disetor dicatat berdasarkan:

a) Jumlah uang yang diterima.

b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.

c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.

d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

u. Ekuitas (*lanjutan*)

e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor aset non-kas.

Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

ii. Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)

Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non- kas. Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat: a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima; b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima.

iii. Modal Sumbangan

Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non kas dari pemilik. Modal sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima. Sumbangan berupa aset non kas dinilai sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima.

2) Dana setoran modal – ekuitas

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari kewajiban (DSM – Kewajiban) ke ekuitas (DSM – Ekuitas) sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

3) Laba/Rugi yang belum direalisasi;

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat

4) Surplus revaluasi aset tetap;

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

5) Saldo laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Saldo laba dikelompokkan menjadi:

i. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.

ii. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan

iii. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari: a) laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan b) laba rugi periode berjalan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

v. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.

Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

w. Beban Operasional

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

x. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

y. Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

z. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

3. KAS

Saldo kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Teller	1.552.900	2.707.600
Kas Kecil	2.000.000	-
Kas Besar	353.300.000	372.500.000
Total	356.852.900	375.207.600

Kas perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan kepada PT Asuransi Central Asia dengan nomor Polis:15115062405000079 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp500.000.000, Cash in transit dengan polis nomor151150624050000068 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000, dan Cash in Cashier box dengan polis nomor:151150624050000057 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000.

4. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA (PBYAD)

Saldo pendapatan bunga yang akan diterima (PBYAD) perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kredit	308.374.541	368.895.346
Penempatan Pada Bank Lain	234.049.820	11.733.168
Total	542.424.361	380.628.514

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Saldo penempatan pada bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Giro Pada Bank Lain		
PT Bank Mandiri Persero Tbk	1.734.084.403	636.342.180
PT Bank Danamon Indonesia	-	-
PT Bank Permata Tbk	3.116.205	30.403.685
PT Bank Central Asia Tbk	120.199.359	93.588.976
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.961.701	743.000.681
PT Bank Mayapada International Tbk	2.770.005	180.748.505
Total Giro Pada Bank Lain	1.862.131.673	1.684.084.027
Tabungan Pada Bank Lain		
PT Bank IBK Indonesia, Tbk	18.224.601	161.781.114
PT Bank J Trust	8.412.383	107.257.723
PT BPR Duta Niaga	-	601.985.538
Total Tabungan Pada Bank Lain	26.636.984	871.024.375
Deposito Pada BPR Lain		
PT Bank Permata Tbk	5.000.000.000	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Duta Niaga	-	1.000.000.000
Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak	1.000.000.000	500.000.000
PT Bank Perekonomian Rakyat Tritunggal	-	500.000.000
PT Bank Perekonomian Rakyat Universal Kalbar	-	500.000.000
Total Deposito Pada BPR Lain	6.000.000.000	2.500.000.000
Total Penempatan Pada Bank Lain	7.888.768.657	5.055.108.402
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	(25.015.581)	-
Total Penempatan Pada Bank Lain-Net	7.863.753.076	5.055.108.402

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

Mutasi PPAP penempatan pada bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo Awal		
PPAP Tahun Berjalan	50.594.004,00	-
Penghapusan PPAP tahun berjalan	(25.578.423)	-
Saldo Akhir	<u>25.015.581</u>	<u>-</u>

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

Saldo kredit yang diberikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing terdiri dari:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Kredit Rekening Koran	19.003.235.076	15.268.287.349
Kredit KPR	14.046.900.506	14.577.657.124
Kredit Investasi	6.926.017.474	9.575.764.750
Kredit KMK Angsuran	6.078.233.246	8.522.029.841
Kredit Aneka Manfaat	6.591.716.480	6.566.842.130
Kredit Fixed Loan	595.064.950	665.032.950
Kredit Demand Loan	-	-
Kredit KKB	600.401.194	385.294.646
Kredit Karyawan	74.858.336	5.833.332
Total Kredit yang Diberikan	<u>53.916.427.262</u>	<u>55.566.742.122</u>
dikurangi:		
Provisi dan Administrasi	(441.467.410)	(492.787.257)
Restrukturisasi Kredit	-	-
PPAP Kredit yang Diberikan	(1.730.824.200)	(1.586.115.295)
Total Kredit yang Diberikan-Net	<u>51.744.135.652</u>	<u>53.487.839.570</u>

Rincian kredit yang diberikan berdasarkan tingkat kolektabilitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Lancar	43.942.725.468	46.305.776.403
Dalam Perhatian Khusus	910.727.309	708.950.638
Kurang Lancar	834.111.572	1.022.915.934
Diragukan	2.306.253.082	1.563.958.075
Macet	5.922.609.831	5.965.141.072
Total	<u>53.916.427.262</u>	<u>55.566.742.122</u>

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Mutasi PPAP kredit yang diberikan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	(1.586.115.295)	(1.067.246.820)
Perubahan PPAP Tahun Berjalan	(144.708.905)	(518.868.475)
Saldo Akhir	(1.730.824.200)	(1.586.115.295)

7. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

Agunan yang diambil alih merupakan jaminan kredit dalam bentuk tanah dan bangunan yang telah diambil alih oleh perusahaan. Saldo agunan yang diambil alih (AYDA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.675.947.984 dan Rp1.675.947.984.

Manajemen telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada potensi penurunan nilai agunan yang diambil alih.

8. ASET TETAP DAN INVENTARIS

Saldo aset tetap perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Kendaraan	-	472.176.000	-	472.176.000
Inventaris Kantor	806.279.650	19.790.000	-	826.069.650
Total Biaya Perolehan	806.279.650	491.966.000	-	1.298.245.650
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Kendaraan	-	17.758.500	-	17.758.500
Inventaris Kantor	711.550.818	33.208.169	-	744.758.987
Total Akumulasi Penyusutan	711.550.818	50.966.669	-	762.517.487
Nilai Buku	94.728.832			535.728.163
	31 Desember 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Inventaris Kantor	746.040.650	60.239.000	-	806.279.650
Total Biaya Perolehan	746.040.650	60.239.000	-	806.279.650
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Inventaris Kantor	665.722.088	45.828.730	-	711.550.818
Total Akumulasi Penyusutan	665.722.088	45.828.730	-	711.550.818
Nilai Buku	80.318.562			94.728.832

9. ASET TIDAK BERWUJUD

Saldo aset tidak berwujud perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Program Software IT	111.700.000	-	-	111.700.000
Total Biaya Perolehan	111.700.000	-	-	111.700.000
<u>Akumulasi Amortisasi</u>				
Program Software IT	111.699.998	-	-	111.699.998
Total Akumulasi Penyusutan	111.699.998	-	-	111.699.998
Nilai Buku	2			2

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>				
Program Software IT	111.700.000	-	-	111.700.000
Total Biaya Perolehan	111.700.000	-	-	111.700.000
<u>Akumulasi Amortisasi</u>				
Program Software IT	111.699.998	-	-	111.699.998
Total Akumulasi Penyusutan	111.699.998	-	-	111.699.998
Nilai Buku	2			2

10. ASET LAIN-LAIN

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Biaya dibayar dimuka	8.072.427	3.257.575
Persediaan Bahan Hasis Pakai Kantor	21.626.803	23.062.697
Lainya	121.018.079	44.143.392
Total	150.717.309	70.463.664

11. KEWAJIBAN SEGERA

Saldo kewajiban segera per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PPh Pasal 21	16.488.085	19.362.004
PPh Pasal 4 ayat 2	47.638.100	45.162.097
Pajak Lainnya	3.033.504	2.788.897
Titipan Premi Asuransi	32.344.079	198.816.499
Titipan Nasabah	17.897.297	16.397.297
Titipan Premi Asuransi Kendaraan	9.400.000	7.850.000
Titipan Biaya Notaris	112.295.000	146.070.000
Kewajiban segera lainnya	4.950.000	5.675.000
Total Kewajiban Segera	244.046.065	442.121.794

12. UTANG BUNGA

Saldo utang bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tabungan	11.988.947	11.040.320
Deposito	124.148.517	124.726.481
Total Kewajiban Segera	136.137.464	135.766.801

13. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp104.225.824 dan Rp40.326.650. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba (rugi) kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	813.154.915	641.223.151
Koreksi fiskal		
Biaya Sumbangan	1.500.000	320.000
Sanksi pelanggaran BPR	99.724.560	584.753
Imbalan Pascakerja	94.350.000	240.850.000
Dana Pendidikan	44.122.383	-
Atensi Relasi	52.900.800	-
PPAP	25.015.581	-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)/(Rugi Fiskal)	1.130.768.239	642.127.904

13. UTANG PAJAK (Lanjutan)

	2024	2023
Total Omset	8.088.949.140	7.440.282.266
PKP-Fasilitas	671.000.331	569.641.552
PKP-Non Fasilitas	459.767.909	313.336.352
Beban Pajak		
Fasilitas	73.810.036	62.660.571
Nonfasilitas	101.148.940	68.933.997
Total Beban Pajak	174.958.976	131.594.568
PPH Pasal 25	(70.733.152)	(91.267.918)
	104.225.824	40.326.650

14. SIMPANAN

Saldo simpanan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tabungan		
Tabungan Bisnis	1.097.393.015	1.016.522.016
Tabungan Dana Junior	285.204.083	308.597.454
Tabungan Dana Inti	4.171.615.205	4.610.584.679
Tabungan Chakra	-	1.500.000
Biaya Transaksi Tabungan	(22.452)	(259.830)
Total	5.554.189.852	5.936.944.319
Deposito		
Jangka Waktu 1 Bulan	13.761.113.781	11.611.663.939
Jangka Waktu 3 Bulan	15.248.362.834	18.392.674.577
Jangka Waktu 6 Bulan	15.346.189.232	15.491.821.095
Total	44.355.665.847	45.496.159.611
Total Simpanan	49.909.855.699	51.433.103.930

Rincian simpanan berdasarkan keterikatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tabungan		
Terkait	1.529.288.540	743.526.584
Tidak Terkait	4.024.901.312	5.193.417.735
Total	5.554.189.852	5.936.944.319
Deposito		
Terkait	10.610.630.511	10.981.703.533
Tidak Terkait	33.745.035.336	34.514.456.078
Total	44.355.665.847	45.496.159.611

15. PINJAMAN YANG DITERIMA

Per 31 Desember 2024 dan 2023 saldo Pinjaman yang diterima Perusahaan dari bank lain sebesar Rp2.654.143.062 dan Rp0,00. Saldo Pinjaman tersebut merupakan fasilitas Kredit rekening koran dari PT Bank Permata Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan nomor: KK/24/134022/N/SME pada tanggal 28 Maret 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas : Fasilitas Pinjaman Rekening Korang-CBF BPR
Pagu Fasilitas : Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)
Jangka Waktu : 28 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2025
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : TD + 0,75% Tahunan
Provisi : 36%
Biaya Administratif : Rp1.750.000,-

Biaya penalti pembayaran dipercepat atas seluruh pinjaman sebesar 5% (lima persen) dari pagu fasilitas nasabah.

Jaminan

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terhitung berdasarkan perjanjian hingga lunas dan penuh, dengan ini Nasabah akan memberikan jaminan kepada bank berupa:

a. Deposito

Nomor : 8800050566
Nama pemilik : PT BPR Chakra
Menjamin Fasilitas : Fasilitas Pinjaman Rekening Korang-CBF BPR

b. Deposito

Nomor : 8800050571
Nama pemilik : PT BPR Chakra
Menjamin Fasilitas : Fasilitas Pinjaman Rekening Korang-CBF BPR

c. Deposito

Nomor : 8800050589
Nama pemilik : PT BPR Chakra
Menjamin Fasilitas : Fasilitas Pinjaman Rekening Korang-CBF BPR

Per 31 Desember 2024 terdapat sisa fasilitas yang belum digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp2.345.856.937,98 yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan sesuai Ketentuan dalam Perjanjian.

16. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Saldo kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp618.568.343 dan Rp524.218.343. Manajemen menghitung sendiri kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan kebutuhan manajemen. Manajemen berpendapat bahwa jumlah kewajiban imbalan pasca kerja yang dibentuk mencukupi.

Manajemen menyadari metode Pencadangan sebagaimana diuraikan di atas belum sesuai dengan Mekanisme perhitungan cadangan liabilitas imbalan pascakerja sesuai SAK ETAP bab 23 tentang imbalan kerja, hal tersebut murni karena keterbatasan perusahaan. Namun manajemen yakin nilai cadangan yang disajikan dalam laporan keuangan sudah mencukupi.

17. EKUITAS

Saldo ekuitas perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Modal disetor	8.000.000.000	8.000.000.000
Saldo laba ditahan	564.387.050	54.758.468
Laba tahun berjalan	638.195.939	509.628.582
Total	9.202.582.989	8.564.387.050

18. PENDAPATAN BUNGA

Saldo pendapatan bunga perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan:

	2024	2023
Kredit Rekening Koran	1.874.041.339	1.439.215.226
Kredit <i>Demand Loan</i>	-	80.090.834
Kredit Modal Kerja	874.392.959	939.520.754
Kredit <i>Fixed Loan</i>	45.688.018	38.027.361
Kredit Perumahan Rakyat	1.961.236.813	1.930.765.924
Kredit KKB	54.688.399	36.409.855
Kredit Aneka Manfaat	863.788.926	742.801.562
Kredit Pinjaman Karyawan	2.824.009	1.759.490
Kredit Investasi	994.265.894	1.074.550.697
Total	6.670.926.357	6.283.141.703

18. PENDAPATAN BUNGA (Lanjutan)

b. Pendapatan bunga penempatan pada bank lain:

	2024	2023
Pendapatan bunga Giro	50.785.589	138.569.205
Pendapatan bunga Tabungan	25.235.457	10.336.053
Pendapatan bunga deposito	616.274.358	453.875.273
Total	692.295.404	602.780.531

c. Pendapatan provisi dan Administrasi adalah berikut ini:

	2024	2023
Provisi	243.397.624	202.806.017
Administrasi	101.626.423	78.518.502
Total	345.024.047	281.324.519
Total Pendapatan Bunga-Net	7.708.245.808	7.167.246.753

19. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINYA

Saldo pendapatan operasional lainnya perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pemulihan PPAP	25.578.423	29.060.533
Denda	54.394.167	53.703.800
Administrasi dan Penutupan Tabungan	29.599.397	30.011.590
Pendapatan lainnya	266.678.061	159.004.403
Total	376.250.048	271.780.326

20. BEBAN BUNGA

Saldo beban bunga perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
a. Beban Bunga pada Bank Lain		
Deposito	11.248.366	-
Total	11.248.366	-
b. Beban Bunga pihak ketiga bukan bank		
Tabungan	127.709.881	202.005.159
Deposito	2.986.166.855	2.385.645.388
Total	3.113.876.736	2.587.650.547
e. Premi Lembaga Penjamin Simpanan	123.893.834	103.286.428
Total	3.249.018.936	2.690.936.975

21. BEBAN OPERASIONAL

Saldo beban operasional perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
a. Penyisihan kerugian		
Penyisihan kerugian simpanan pada bank lain	50.594.004	26.192.533
Penyisihan kerugian kredit	144.708.905	521.736.475
	195.302.909	547.929.008
b. Beban pemasaran	60.460.650	38.501.605
c. Administrasi dan umu		
Gaji dan Upah	1.072.023.645	1.063.253.044
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
Lembur	8.841.797	4.723.111
Tunjangan Hari Taya	153.811.667	99.038.500
Uang makan	226.732.728	230.880.151
Tunjangan Jabatan	165.913.636	161.957.576
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	8.010.116	7.224.696
Profesional	17.000.000	16.000.000
Beban Honorarium	235.200.000	235.200.000
Tunjangan Kesehatan	54.718.144	36.166.912
Tenaga Kerja Lainnya	791.935.547	634.434.662
Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	50.966.669	45.828.730
Premi Asuransi	8.559.534	7.650.850
ATK dan Bahan Habis Pakai Kantor	24.062.144	24.479.241
Rumah Tangga Kantor	127.438.540	108.078.200
Sewa Kantor	454.300.000	366.300.000
Listrik, Air dan Telepon	60.701.455	57.714.360
Imbalan Kerja	94.350.000	226.650.000
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	30.473.105	113.432.305
Pajak	81.735.865	6.130.823
Olahraga dan Rekreasi	13.170.000	31.437.600
Administrasi Bank	8.259.900	5.825.300
Biaya Inventaris	1.873.000	5.752.100
Lainya	16.261.600	5.497.900
	3.706.339.092	3.493.656.061
d. Beban operasional lainnya		
Iuran OJK	38.657.564	20.950.556
Beban lain-lain	1.300.000	6.500.158
	39.957.564	27.450.714
Total	4.002.060.215	4.107.537.388

22. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINYA

Saldo pendapatan dan beban non operasional lainnya perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Keuntungan penjualan AYDA	-	-
Pendapatan non operasional lainnya	4.453.284	1.255.187
Beban non operasional lainnya	(24.715.074)	(584.753)
Toral pendapatan (beban) non operasional bersih	(20.261.790)	670.434

25. REKENING ADMINISTRATIF

Saldo rekening administratif perusahaan per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	2024	2023
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	3.239.912.818	2.544.565.803
Aktiva Produktif yang Dihapus Buku	-	-
Fasilitas Kredit nasabah yang belum ditarik	3.616.764.924	-
Lain-lain yang bersifat Administratif	515.889.957	571.567.851
Fasilitas Pinjam yang diterima namun belum digunakan	2.345.856.938	-
Total	9.718.424.637	3.116.133.654

26. KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Setelah tanggal pelaporan keuangan terdapat peristiwa atau kejadian penting yang perlu di ungkapkan oleh manajemen, namun peristiwa-peristiwa tersebut tidak berdampak terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan Per 31 Desember 2024 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. adapun peristiwa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Per tanggal 1 Januari 2025 Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat yang diterbitkan tanggal 24 Desember 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Semua dampak atas penerapan kebijakan tersebut akan diterapkan untuk laporan keuangan tahun 2025, dan informasi komparatif atas laporan keuangan tahun 2025 akan disajikan secara Restrospektif, dan apabila tidak praktis akan disajikan secara prospektif sesuai ketentuan dalam SAK EP.

27. PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 24 April 2025 dan 14 Maret 2024.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera
Posisi Laporan : Tahun 2024

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cahaya Khatulistiwa Sejahtera atau disingkat BPR Cahra, menyatakan bahwa :

1. Direksi bertanggung jawab dalam Penerapan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Tahunan ini. Untuk itu telah ditunjuk seorang Penanggung Jawab Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
2. Data dan/atau Informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR Tahun 2024 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Sandra Pracipta, SE.,AK.,CA.,CPA.,AseanCPA.CPI. dari Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA.
3. Seluruh informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan 2024 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
4. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Tahun 2024 dinilai Cukup Efektif dan Tanpa Adanya Intervensi dari pihak manapun.

Pontianak, 22 April 2025
PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA



Hasan
Direktur Utama



Muhammad Purnama
Direktur